

MANAJEMEN RISIKO, MEMBANGUN KETAHANAN DAPEN HADAPI GUNCANGAN MONETER & GEOPOLITIK



**DAMPAK KENAIKAN TINGKAT
SUKU BUNGA DAN INFLASI SERTA
KURS USD TERHADAP IMBAL
HASIL INVESTASI DANA PENSIUN**

**NAVIGASI STRATEGIS
PORTOFOLIO DANA PENSIUN
DI TENGAH VOLATILITAS
EKSTREM 2026**

**MENIMBANG PERLUNYA KEBIJAKAN
PENYANGGA PADA MASA GUNCANGAN
MONETER DAN VOLATILITAS PASAR BAGI
DANA PENSIUN**

info DANA PENSIUN

REDAKSI

Penasihat:
Abdul Hadi
Sularno

Pemimpin Umum:
Chairi Pitono

Wakil Pemimpin Umum:
Antonius R Tyas Artono

Pemimpin Redaksi:
Budi Sutrisno

Redaktur Pelaksana:
Fransiskus Imung

Sekretaris Redaksi:
Budi Sulistijo, Purwaningsih (Wakil)

Dewan Redaksi:
Abdul Hadie, Bambang Sri Mulyadi,
Asmorohadi, Nugroho Dwi Priyohadi,
Faizal Ridwan Zamzany

Kuangan:
Heru Azam Zamzami

Pemasangan Iklan:
Marissa Renimas Harlandea

Fotografer:
Nisa Qurratu'Ain

Sirkulasi/Distribusi:
M. Subandi

ALAMAT REDAKSI:
Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 3, Suite 3.05
Jln Jenderal Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220
Telp. (021) 251 4761, 251 4762, Faks: 251 4760
E-mail: adpipusat@adpi.or.id

PENERBIT:
PT JAGATMEDIA & BISNIS

MENATA RISIKO DI TENGAH KETIDAKPASTIAN

Gejolak ekonomi yang mewarnai semester pertama 2026 menjadi ujian berat bagi pelaku pasar keuangan, termasuk industri dana pensiun. Koreksi tajam pasar saham, pelemahan rupiah, serta meningkatnya ketidakpastian global sempat menekan kinerja berbagai instrumen investasi. Namun, di balik tekanan tersebut, mulai muncul sinyal pemulihan yang membuka kembali peluang bagi investor jangka panjang.

Penguatan IHSG dalam beberapa pekan terakhir, stabilisasi nilai tukar, serta membaiknya sentimen pasar menunjukkan bahwa fase terburuk kemungkinan telah berlalu. Valuasi sejumlah aset juga berada pada level yang lebih menarik dibandingkan awal tahun. Kondisi ini menciptakan ruang bagi dana pensiun untuk mengoptimalkan strategi investasinya.

Meski demikian, peluang tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk meng-



abaikan prinsip kehati-hatian. Berbagai risiko masih membayangi perekonomian, mulai dari dinamika geopolitik, arah kebijakan moneter global, hingga tantangan fiskal domestik. Karena itu, pengelolaan investasi dana pensiun harus tetap berpijak pada tata kelola yang baik dan manajemen

risiko yang kuat. Karena pada akhirnya, tujuan utama dana pensiun bukan sekadar mengejar imbal hasil, melainkan menjaga keberlanjutan manfaat bagi peserta. Dapen hanya akan memberikan hasil optimal apabila disertai kehati-hatian.

Pesan regulator menjadi sangat relevan. Setiap dana pensiun memiliki profil liabilitas dan toleransi risiko yang berbeda, sehingga keputusan investasi harus didasarkan pada perhitungan yang cermat, diversifikasi yang memadai, serta disiplin dalam pengelolaan portofolio. Selamat membaca.

Wasallam
Redaksi

DAFTAR ISI >>

UTAMA

(HAL 3 - 7)

MANAJEMEN RISIKO, SOLUSI MERESPONS GEJOLAK EKONOMI INDONESIA



8

[KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno

**Navigasi Strategis Portofolio
Dana Pensiun di Tengah
Volatilitas Ekstrem 2026**

10

[KOLOM] Oleh: Bambang Sri Mulyadi

**Dampak Kenaikan Tingkat Suku
Bunga dan Inflasi Serta Kurs USD
Terhadap Imbal Hasil Investasi
Dana Pensiun**

12

[KOLOM] Oleh: Abdul Hadi

**Menimbang Perlunya Kebijakan
Penyangga Pada Masa Guncangan
Moneter dan Volatilitas Pasar Bagi
Dana Pensiun**

14

[KOLOM] Oleh: Chairi Pitono

**Risiko Investasi Dana Pensiun
di Tengah Ketidakpastian**

20

[KOLOM] Oleh: Siti Rakhmawati

**Penguatan Dana Pensiun
dengan Program Manfaat Pasti
Melalui Strategi LDI**

26

[KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno

**"Standardisasi Kompetensi
Manajemen Risiko Dana Pensiun/
SKKNI MRDP"**

EKSPOSE

(HAL 16 - 18)

**Seminar "Penguatan Strategi
Investasi Dapen melalui Outlook Ekonomi,
Pendekatan LDI, dan Tata Kelola Akuntansi
yang Berkelanjutan"**



24

[KOLOM] Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi

**Smart Saving, Spending,
& Investing**

Catatan Kegiatan ADPI Goes To Campus

[INFOGRAFIS]

Oleh: Antonius Resep Tyas Artono

- Kinerja Dapen Konvensional
- Profil Dapen Konvensional
- Perkembangan Iuran vs Manfaat

19

MANAJEMEN RISIKO, SOLUSI MERESPONS GEJOLAK EKONOMI INDONESIA



Pasar modal Indonesia mulai menunjukkan sinyal pemulihan setelah IHSG menguat 12,46% pada 12 Juni 2026. **Meski fase terburuk diprediksi telah berlalu**, investor diimbau tetap menerapkan manajemen risiko ketat di tengah ketidakpastian fundamental ekonomi.

Kurs rupiah terhadap dolar AS dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya merambat naik, ketika terpantau pada Jumat, 12 Juni 2026. Kurs rupiah sempat mencapai level terendah tahun ini pada 8 Juni 2026, tepatnya Rp18.166 per dolar AS, akhirnya menguat 1,68% menjadi Rp17.860 per dolar pada 12 Juni 2026.

Sedangkan IHSG yang menyentuh level terendah 5.342,14 pada 8 Juni, akhirnya terkerek 12,46% berhasil menembus kembali level 6.007,66 pada 12

Juni. Namun, kenaikan 12,46% itu belum cukup membuat investor tenang, sebab ketidakpastian ekonomi masih membayangi.

Bagaimana tidak? Jika memotret pergerakan IHSG misalnya, kenaikan 12% pada pekan antara 8-12 Juni masih sangat jauh dari gambaran penuh *euphoria* pada awal tahun 2026. Mencermati data Bursa Efek Indonesia, posisi IHSG tertinggi tahun ini pada level 9.134,70 yang dicapai pada 20 Januari 2026. Sedangkan posisi terendah 5.342,14 pada penutupan tanggal 8 Juni 2026. Itu artinya IHSG sempat rontok 38,9%.

Itu artinya, penurunan IHSG akibat turbulensi ekonomi tahun ini lebih tinggi dibanding penurunan pada masa Covid-19 tahun 2020 sebesar 37,7%. Demikian halnya, pada 2020, pada tahun puncak Covid, rupiah melemah 1,33% atau sedikit lebih baik dari tahun ini.

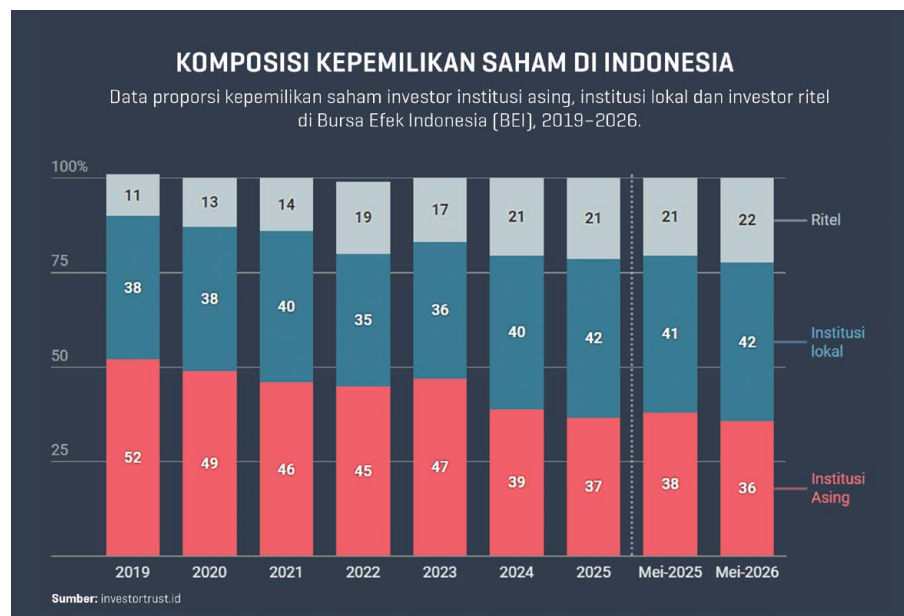
Melihat berbagai indikator ekonomi faktual ini, pesan buat industri dana pensiun masih tetap sama. Tetap menerapkan manajemen risiko yang ketat dalam pengelolaan manfaat peserta, terutama dalam pengelolaan investasi.

Tekanan fundamental masih mengintai perekonomian Indonesia. Isu penting yang menjadi sorotan seperti risiko pelebaran defisit anggaran. Realitanya pasar masih tetap memantau komitmen anggaran pemerintahan setelah sempat tercatat posisi defisit anggaran per Mei 2026 sebesar 0,70% dari PDB, dibanding posisi Mei 2025 sebesar 0,09%. Itu sebabnya Fitch Ratings memproyeksikan defisit fiskal Indonesia tahun 2026 bisa melebar ke 2,9% dari PDB, lebih tinggi dari target resmi pemerintah di level 2,7%.

Indonesia juga mengalami lonjakan biaya bunga utang (*Debt Service*). Tak heran bila S&P Global Ratings menyoroti beban pembayaran bunga utang Indonesia yang membengkak hingga melampaui 15% dari total pendapatan negara. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan fleksibilitas fiskal.

Indonesia disorot karena ketidakpastian regulasi ekspor satu pintu dan pembentukan badan baru di bawah Danantara yang mengendalikan ekspor komoditas utama (sawit, batu bara, paduan besi). Hal ini tak pelak memicu sikap *wait-and-see* dari investor global.

Sikap investor global ini terjadi setelah keluar secara masif dari pasar modal Indonesia sejak pengurangan bobot saham Indonesia (*rebalancing*) oleh MSCI dan FTSE Russell. Ditambah guncangan fundamental dan kebijakan bunga The Fed, total *capital outflow* selama 2026 telah mencapai Rp 67,34 triliun sampai dengan 12 Juni 2026. Sedangkan arus



modal keluar dari pasar obligasi mencapai Rp 12,8 triliun.

Berbagai indikator pasar ini kontras dengan performa sektor riil, setelah pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 mencapai 5,61% (yoy). Investor masih punya persepsi bahwa risiko masih mengintai fundamental ekonomi Indonesia.

Investor lokal kini menanti sikap MSCI Inc. yang sejauh ini mengapresiasi upaya reformasi yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia. Meski demikian, Lembaga ini masih mempertahankan sejumlah kebijakan pembatasan terhadap pasar saham Indonesia.

Sesuai kerangka *Index Review* Mei 2026, MSCI menegaskan akan mempertahankan kebijakan sementara (*interim treatment*) yang telah diberlakukan sebelumnya untuk pasar Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi pembekuan seluruh kenaikan *Foreign Inclusion Factor* (FIF) dan *Number of Shares* (NOS), penghentian sementara penambahan konstituen baru ke dalam MSCI *Investable Market Indexes* (IMI), serta pembekuan perpindahan saham ke segmen indeks yang lebih tinggi, termasuk dari kategori *small cap* ke *standard*.

Selain itu, MSCI juga mengumumkan akan menghapus saham-saham yang

diidentifikasi memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi (*high shareholding concentration/HSC*) oleh otoritas Indonesia. Dalam proses evaluasi, MSCI dapat memanfaatkan data pengungkapan pemegang saham di atas 1% untuk menyesuaikan estimasi *free float* apabila dianggap relevan.

Update MSCI atas upaya restrukturisasi pasar modal Indonesia diumumkan 19 Juni 2026. Meski demikian, Morgan Stanley Capital International (MSCI) tetap akan mempertahankan klasifikasi pasar modal Indonesia dalam kategori *emerging market* atau pasar berkembang. Bukan *frontier market*. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivat, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Hasan Fawzi menilai keputusan tersebut menjadi sinyal positif bagi pasar modal Indonesia.

“Pasar kita tetap dinilai baik, kredibel, dan prospektif, terbukti tidak ada penurunan klasifikasi pasar. Saat ini kita masih *confirm* berada di kelompok *emerging market* seperti sebelumnya,” ujar Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (13/5/2026).

Tantangan terbesar masih dari Lembaga pemeringkat yang selama ini memberi *warning* soal Risiko fiskal dan

moneter yang mengintai fundamental ekonomi Indonesia. Jika dicermati, tren penurunan indeks setelah menembus level psikologis 9.134 pada Januari 2026, terjadi sejak Moodys Investors Services menjadi lembaga pertama yang menurunkan *outlook* kredit Indonesia menjadi Negatif. Ini menjadi alarm awal bagi investor global

Menyusul S&P Global Ratings memperingatkan bahwa meningkatnya tekanan fiskal, khususnya biaya pembayaran utang yang lebih tinggi. Meski masih mempertahankan Indonesia pada level investment grade, S&P menilai risiko tersebut menambah risiko penurunan terhadap profil kredit pemerintah

Indonesia dan berpotensi memicu aksi penurunan peringkat.

Terakhir Fitch Ratings yang menurunkan *outlook* kredit Indonesia dari Stabil ke Negatif. Fitch menilai pertumbuhan ekonomi jangka menengah tetap solid, namun melihat risiko konsolidasi fiskal yang melambat.

Umumnya lembaga *rating* global menilai rekam jejak Indonesia dalam memperluas basis penerimaan masih rentan risiko pelebaran defisit fiskal serta mengindikasikan munculnya kelemahan dalam perencanaan dan yang berimplikasi pada kredibilitas kebijakan. Program ekonomi bermuatan sosial yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat menjadi

sorotan, dan diharapkan direspons dengan penataan ulang secara signifikan.

FASE REBOUND & VALUASI MURAH

Merespons rekomendasi Lembaga pemeringkat global, baik otoritas pasar modal, otoritas fiskal, maupun otoritas moneter terus melakukan pembenahan. Restrukturisasi kebijakan kepemilikan saham merespons catatan dari MSCI, OJK dan SRO telah menempuh sejumlah langkah signifikan.

Pada sisi moneter, BI telah dua kali menaikkan suku bunga acuan atau BI rate, yakni 50 basis poin pada Mei menjadi 5,25% dan pada 9 Juni 2026 kembali dinaikkan 25 basis poin menjadi 5,5%. Sedangkan pada sisi fiskal, pemerintah memberi sinyal perbaikan pada tata kelola dan efisiensi program MBG.

Dari isu geopolitik, Presiden AS Donald Trump memberi indikasi segera mencapai tahapan perdamaian dalam perang AS-Israel kontra Iran. Meski media Iran melaporkan Minggu (14/06/2026) bahwa Teheran belum mengambil keputusan final mengenai kerangka nota kesepahaman dengan AS, telah ada kemajuan signifikan dalam upaya mengakhiri perang.

Walau manajemen risiko tetap harus menjadi suluh dalam mengambil langkah investasi, berbagai indikasi positif ini memberikan harapan. Head of Research PT Samuel Sekuritas, Prasetya Gunadi menilai fase terburuk pasar saham Indonesia telah berlalu (*worst is over*).

Setelah mengalami koreksi tajam dalam beberapa bulan terakhir, valuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinilai sudah berada di level yang sangat murah sehingga membuka peluang pemulihan yang signifikan.

Prasetya juga berpandangan, penguatan nilai tukar rupiah menjadi salah satu sinyal penting yang mendukung pemulihan pasar. Di sisi lain, ia berpendapat, walau masih diliputi pro kontra, kebijakan ekspor untuk mengurangi praktik *under-invoicing* dalam meningkatkan devisa negara.



Top 10 Aset Manager Dunia

Nama Perusahaan	Managed AUM US\$, billion
1 BlackRock	14.0
2 Vanguard	12.0
3 Fidelity Management & Research	7.1
4 The Capital Group Cos. Inc.	3.2
5 Amundi	2.8
6 Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO)	2.3
7 Invesco	2.2
8 Empower Growth Capital	2.0
9 BPCE and Generali Joint Asset Manager	2.0
10 Geode Capital Management	1.9

Sumber: investortrust.id

Berdasarkan riset Samuel Sekuritas, saat ini IHSG diperdagangkan pada valuasi sekitar 8,8 kali *forward price to earnings* (P/E) satu tahun. Angka ini menggambarkan 11% di bawah level minus dua standar deviasi, dan 36% di bawah rata-rata lima tahun.

Berdasarkan empat siklus *bear market* sebelumnya, IHSG rata-rata menguat sekitar 16,5% dalam tiga bulan setelah mencapai titik terendah. Berlanjut menguat 25,3% dalam enam bulan, dan *rebound* hingga mencapai 58,5% dalam 12 bulan.

Umumnya para analis merekomendasikan investor mengambil kebijakan rotasi portofolio ke sektor perbankan yang memiliki fundamental kuat dan valuasi menarik. Empat saham berkapitalisasi besar sekaligus kelompok KBMI IV yakni BBRI, BBKA, BMRI, dan BBNI menjadi pilihan utama. Sedangkan kelompok bank KBMI III yang juga dinilai menarik seperti BNGA dan BDMN.

Kelompok saham yang juga dinilai menarik adalah emiten berbasis pendapatan dolar AS, terutama di sektor logam dan batu bara. Nama-nama yang dinilai menarik seperti ANTM, BUMI, TINS, INCO, maupun AMMN.

Pandangan analis ini juga memperhitungkan tren *net buy* pemodal asing yang mulai tampak pada sejumlah saham bank, setelah sebelumnya melego kepemilikan dalam jumlah signifikan. Pada perdagangan, Jumat (12/6/2026), investor asing akhirnya merealisasikan pembelian bersih (*net buy*) saham senilai Rp 287,77.

Analisis BRI Danareksa Sekuritas Naura Reyhan Muchlis dan Victor Stefano menyebutkan, valuasi saham perbankan Indonesia saat ini telah mencerminkan premi risiko yang berlebihan dan ekspektasi pertumbuhan yang terlalu negatif. Harga saham sektor perbankan telah berada di bawah minus tiga standar deviasi (-3SD) dari rata-rata lima tahun terakhir.

Penurunan harga saham sektor perbankan nasional berkisar 15-36% secara year to date jika dihitung sampai 12 Juni 2026. Penurunan harga tersebut merefleksikan asumsi kontraksi laba emiten perbankan nasional untuk tahun buku 2026.

Menurut Naura dan Victor, asumsi tersebut menunjukkan ekspektasi penurunan laba sebesar 22,8% untuk BBRI, 14,9% untuk BBKA, 12,7%



Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, **Ogi Prastomiyono**

untuk BMRI, dan 11,1% untuk BBNI. “Proyeksi tersebut terlalu berlebihan, jika dibandingkan dengan rekam jejak pertumbuhan laba sektor perbankan dalam jangka panjang. Padahal, kinerja keuangan bank sampai bulan April masih menunjukkan pertumbuhan kuat,” demikian laporan riset Naura dan Victor.

POTENSI BUYBACK

Jika dicermati secara individual saham, *rebound* harga saham papan atas punya korelasi dengan Keputusan *buyback* saham yang ditempuh manajemen. Selain *buyback* pada kalangan BUMN seperti Bank BRI, Bank Mandiri, mau-

pun Telkom (TLKM) sejumlah korporasi swasta juga mengambil langkah serupa.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) mengumumkan telah mendapatkan persetujuan *buyback* bernilai maksimal Rp4 triliun. Dana ini mulai dialokasikan pada Juni 2026 ini. Sedangkan manajemen BRI menyatakan mengalokasikan dana Rp 500 miliar untuk *buyback*.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan *buyback* saham ini merupakan bagian dari strategi perseroan untuk meningkatkan nilai pemegang saham sekaligus mencerminkan keyakinan manajemen terhadap kekuatan fundamental kinerja perseroan serta prospek pertumbuhan jangka panjang yang tetap solid.

“Kami menilai valuasi BBRI saat ini masih berada di bawah nilai wajarnya atau belum sepenuhnya merefleksikan kinerja dan potensi bisnis perseroan,” ujar Dhanny melalui pernyataan resmi di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Dari kalangan swasta, manajemen PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menyatakan melanjutkan program *buyback* dengan nilai maksimal Rp5 triliun. Presiden Direktur BCA Hendra Lembong mengungkapkan aksi korporasi

ini merupakan lanjutan dari realisasi program *buyback* saham yang sebelumnya dilaksanakan pada April 2026 lalu.

Hendra menegaskan, aksi korporasi ini bagian dari kepercayaan BCA terhadap kondisi pasar modal Indonesia. “Pelaksanaan *buyback* merupakan sinyal optimisme kami di pasar modal Indonesia. Aksi korporasi ini juga sudah mempertimbangkan kondisi fundamental Perseroan,” ujar Hendra Lembong dalam siaran pers, Kamis (11/6/2026).

Sebelumnya, pada Mei lalu, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) juga mengumumkan pembelian kembali saham senilai maksimal Rp5 triliun. Hal

ini akan direalisasikan secara bertahap selama 12 bulan. Pelaksanaan *buyback* akan mempertimbangkan kondisi pasar dan pergerakan harga saham AADI.

Direktur Utama AADI Julius Aslan mengatakan, *buyback* dilakukan untuk menjaga nilai saham perseroan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap fundamental perusahaan. “Kalau harga saham turun, sementara fundamental perusahaan bagus, ya kita beli. Supaya menaikkan kepercayaan investor,” ujar Julius Aslan, usai RUPS AADI di Gedung Cyber 2, Kuningan, Jakarta.

Tak ketinggalan, manajemen PT Astra International Tbk (ASII) juga mengumumkan rencana pembelian kembali (*buyback*) saham dengan nilai maksimal Rp 8 triliun. Aksi ini disebut bagian dari strategi alokasi modal untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Demikian bunyi pengumuman resmi ASII melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (10/6/2026).

Pelaksanaan *buyback* tersebut tetap memperhatikan ketentuan bahwa jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Selain itu, perseroan memastikan jumlah saham *free float* setelah pelaksanaan *buyback* saham tidak akan kurang dari 15% dari modal ditempatkan dan disetor.

Pada sisi lain, pasar obligasi Indonesia memasuki bulan Juni 2026 dihinggapi sentimen pengetatan moneter. Imbal hasil (*yield*) Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun sempat menyentuh level 7,17% di tengah tekanan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.

Pada awal Juni, pasar sempat dihadapkan pada fenomena kurva imbal hasil terbalik (*inverted yield curve*), ketika *yield* SUN tenor 1 tahun melonjak hingga 7,10% (tertinggi sejak 2018), sekaligus melampaui *yield* tenor 10 tahun. Namun, pada pertengahan Juni, *yield* SUN 10 tahun turun dan bergerak stabil di kisaran 7,17%.

Kenaikan *yield* obligasi ini didorong oleh siklus kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI).

BCA Sekuritas berpandangan bahwa penyesuaian *yield* di atas 7% membuat obligasi Indonesia kembali kompetitif. Merespons kondisi ini, BNI Sekuritas merekomendasikan obligasi pemerintah dan Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) sebagai instrumen pegangan yang relatif aman.

TANTANGAN DAPEN 2026

Pada akhir kuartal pertama 2026, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono pernah memberi catatan tentang berbagai Risiko yang harus dihadapi Dapen selama 2026.



STRATEGI ALOKASI ASET MASING-MASING DAPEN MENJADI FAKTOR PENTING DALAM MENENTUKAN PENCAPAIAN ROI. SETIAP DAPEN MEMILIKI PROFIL LIABILITAS DAN TINGKAT TOLERANSI RISIKO YANG BERBEDA SEHINGGA MEMBUTUHKAN STRATEGI INVESTASI YANG DISESUAIKAN.”

(Ogi Prastomiyono)

Ia memberi catatan, perubahan arah suku bunga global berpotensi menekan hasil investasi Dapen.

“Industri dana pensiun pada 2026 akan menghadapi beberapa tantangan, antara lain dinamika pasar keuangan global yang berpotensi memengaruhi kinerja investasi, termasuk kemungkinan penurunan imbal hasil seiring perubahan arah suku bunga,” tandas Ogi.

Selain faktor eksternal, industri dapen juga dihadapkan pada tantangan struktural, mulai dari kebutuhan penguatan tata Kelola, juga manajemen risiko. Juga ada risiko keterbatasan kapasitas pendanaan dari pemberi kerja pada sejumlah program pensiun.

Menjelang akhir Mei 2026, Ogi Prastomiyono kembali mengingatkan

bahwa industri Dapen menghadapi berbagai tantangan mulai dari tekanan geopolitik global maupun potensi kenaikan inflasi yang dapat memengaruhi hasil investasi. Ia menyebut, sesuai data Maret 2026, *return on investment* (ROI) Dapen tercatat sebesar 0,2%, atau menurun dibanding periode yang sama 2025 sebesar 0,70%.

“Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya risiko geopolitik global yang memberikan tekanan terhadap pasar keuangan domestik,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Penurunan tingkat suku bunga juga dinilai berdampak pada menurunnya imbal hasil (*yield*) investasi. Terutama pada instrumen pasar uang dan pendapatan tetap yang masih mendominasi portofolio investasi Dapen.

Meski begitu, Ogi menilai kinerja investasi dapen sepanjang 2026 masih berpotensi tumbuh positif seiring pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap terjaga dan tingkat inflasi yang relatif terkendali. “Meski pencapaiannya akan sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan domestik,” tegasnya.

Menurut Ogi, strategi alokasi aset masing-masing Dapen menjadi faktor penting dalam menentukan pencapaian ROI. Menurut Ogi, setiap dapen memiliki profil liabilitas dan tingkat toleransi risiko yang berbeda sehingga membutuhkan strategi investasi yang disesuaikan.

“Oleh karena itu, industri Dapen perlu terus memperkuat manajemen risiko, menjaga prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi, serta melakukan diversifikasi portofolio agar ketahanan dan keberlanjutan hasil investasi tetap terjaga,” tegas Ogi Prastomiyono.

Merespons peluang investasi di tengah gejolak ekonomi berkepanjangan saat ini, catatan dari Kepala Eksekutif OJK, Ogi Prastomiyono tentang pentingnya manajemen risiko, menjadi *warning* penting bagi pengurus Dapen. Setiap peluang investasi, perlu dibuat setelah melewati perhitungan cermat. □



Oleh: **Budi Sutrisno**
Direktur Utama Dana Pensiun BCA

NAVIGASI STRATEGIS PORTOFOLIO DANA PENSIUN DI TENGAH VOLATILITAS EKSTREM 2026

Executive Summary: Memasuki paruh pertama tahun 2026, pasar keuangan domestik dihantam kombinasi perfect storm: eskalasi geopolitik Timur Tengah dan guncangan kredibilitas regulasi dalam negeri. Di tengah kejatuhan IHSG dan depresiasi Rupiah yang menyentuh level psikologis baru, industri Dana Pensiun (Dapen) dituntut merombak kompas investasinya demi mengamankan solvabilitas jangka panjang.

Paruh pertama tahun 2026 menjadi ujian orkestrasi yang luar biasa berat bagi para pengelola aset institusional di Indonesia, tidak terkecuali industri Dana Pensiun. Pasar saham dan pasar uang domestik terjebak dalam pusaran volatilitas tinggi. Penurunan tajam pada pasar modal sepanjang tahun berjalan (*year-to-date*) bukan lagi sekadar koreksi sehat, melainkan cerminan dari kecemasan mendalam investor terhadap risiko geopolitik global yang berkelindan dengan ketidakpastian regulasi domestik. Kombinasi fatal ini memicu pelarian modal asing secara masif (*net foreign outflow*) dari pasar modal Indonesia.

KRONOLOGI PERFECT STORM: JANUARI HINGGA JUNI 2026

Untuk memahami kedalaman kontraksi saat ini, kita perlu membedah rentetan sentimen negatif yang terjadi secara beruntun sepanjang tahun berjalan:

- **Januari – Februari (Isu Transparansi & Fiskal):** Awal tahun dibuka dengan pelemahan IHSG sebesar 3,67% MoM di bulan Januari. Pemicunya adalah keputusan mengejutkan dari MSCI yang membekukan perubahan bobot indeks Indonesia akibat mencuatnya isu transparansi. Sentimen global kian memburuk di bulan Februari setelah

lembaga pemeringkat internasional, Moody's, memotong *outlook* *sovereign* Indonesia menjadi Negatif, didorong oleh kekhawatiran pasar atas pelebaran defisit fiskal pada APBN 2026.

- **Maret (Dislokasi Global & Krisis Energi):** Peta risiko bergeser ekstrem ke zona *risk-off*. Eskalasi konflik militer yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berujung pada penutupan Selat Hormuz. Harga minyak mentah dunia meroket mendekati USD 120 per barel, memicu ekspektasi inflasi global yang tinggi. Dampaknya, imbal hasil (*yield*) SBN 10 tahun melonjak ke level 6,83%, sementara IHSG anjlok tajam 14,42% MoM dalam satu bulan saja. Investor asing merespons dengan mengeksekusi penjualan bersih sebesar Rp23 triliun.
- **April – Mei (Krisis Kepercayaan Domestik):** Arus keluar modal asing berlanjut sebesar Rp17 triliun pada April. Sentimen diperkeruh oleh dinamika internal pasca mundurnya anggota kunci dalam tim fiskal Kementerian Keuangan, yang memicu keraguan atas komitmen pemerintah terhadap batas defisit anggaran. Di sektor riil, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Nasional ikut jatuh ke zona kontraksi di level 49,1.

- **Juni (Puncak Ketidakpastian & Intervensi Moneter):** Memasuki awal Juni 2026, tekanan mencapai puncaknya. Kebijakan domestik beruntun mulai dari pengetatan repatriasi 100% nDHE SDA melalui PP No. 21/2026, wacana skema kaku *gross split* komoditas mineral, hingga pengesahan UU perluasan mandat Bank Indonesia dinilai asing mengikis independensi institusional dan kepastian regulasi. Akibatnya, Rupiah terdepresiasi ke rekor terendah Rp18.045 per Dolar AS dan IHSG terperosok hingga -29,14%. Per 9 Juni 2026, Rupiah bahkan masih melemah tipis 0,58% ke level Rp18.082 per Dolar AS.

RESPONS AGRESIF BANK INDONESIA

Menghadapi tekanan hebat ini, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah moneter yang agresif dan *pre-emptive* demi menjaga stabilitas nasional:

- **26 Mei 2026:** BI menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 50 bps menjadi 5,25%.
- **9 Juni 2026:** Secara mengejutkan, di luar jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan resmi yang seharusnya baru digelar 17-18 Juni, BI kembali mengerek suku bunga sebesar 25 bps

menjadi 5,50%. Langkah darurat ini diambil untuk meredam dampak konflik Timur Tengah, tingginya permintaan valas domestik, serta menjaga target inflasi 2026–2027 di kisaran $2,5 \pm 1\%$.

DAMPAK LANGSUNG TERHADAP NERACA DANA PENSIUN

Bagi pengelola Dana Pensiun yang menggunakan pendekatan Nilai Pasar (*Mark-to-Market*) dalam pencatatan portofolionya, guncangan ini langsung menghantam laporan keuangan:

1. **Tekanan pada SPI Saham:** Koreksi tajam IHSG yang mendekati -30% dipastikan membentuk nilai negatif pada delta Selisih Penilaian Investasi (SPI), khususnya pada kantong investasi ekuitas.
2. **Koreksi Nilai Pasar SBN:** Lonjakan *yield* SBN dan obligasi pemerintah sebagai akibat dari kenaikan suku bunga berbanding terbalik dengan harganya. Nilai pasar (*fair value*) portofolio pendapatan tetap Dapen pun ikut menyusut.
3. **Insentif di Pasar Uang:** Sisi positifnya, agresivitas BI-Rate akan mengerek suku bunga deposito perbankan secara bertahap, memberikan angin segar berupa imbal hasil yang lebih positif pada instrumen pasar uang.

KOMPAS STRATEGI: NAVIGASI PORTOFOLIO DAPEN DI MASA KRISIS

Menyeimbangkan dampak negatif di pasar modal dengan peluang di pasar uang adalah kunci utama bagi para pengelola investasi Dapen saat ini. Berikut adalah tiga pilar strategi yang harus diperhatikan:

1. **Pasar Modal: Defensif, Tahan Diri, dan Berburu Dividen**
Selama gelombang *capital outflow* masih berlangsung dan kepercayaan investor asing belum sepenuhnya pulih, strategi terbaik di pasar saham adalah defensif.
 - Kurangi Aktivitas *Trading*: Dana Pensiun sebaiknya menahan diri dari transaksi jual-beli yang spekulatif (*hold*).



- Reposisi ke Emiten Berfundamental Kuat: Alihkan bobot portofolio ke saham-saham berkapitalisasi besar yang memiliki *pricing power*, kinerja laba yang resilien di tengah inflasi, serta rekam jejak pembagian dividen yang konsisten. Fokus utama digeser dari mengejar *capital gain* menjadi mengamankan *dividend yield* yang tinggi untuk menjaga arus kas masuk.

2. Pasar Uang: Optimalisasi Likuiditas Tinggi

Pasar uang menjadi penyelamat portofolio saat pasar modal mengalami dislokasi. Manfaatkan momentum kenaikan suku bunga untuk memperkuat *cash flow* internal:

- Deposito Bank Buku Atas: Tempatkan kelebihan likuiditas pada deposito bank-bank yang memiliki permodalan kuat (tier-1) untuk meminimalkan risiko kredit, sambil menikmati transmisi kenaikan suku bunga perbankan.
- Optimalisasi SRBI (Sertifikat Rupiah Bank Indonesia): Instru-

men ini menjadi pilihan yang sangat atraktif. Dengan tenor pendek (3, 6, dan 9 bulan), per 9 Juni 2026 rata-rata kupon SRBI telah menyentuh 7% per tahun jauh lebih tinggi daripada rata-rata deposito biasa, dengan risiko yang relatif bebas gagal bayar (*sovereign risk*).

3. Pilar Internal: Efisiensi Operasional Radikal

Ketika kendali atas imbal hasil investasi di pasar luar berada di luar kontrol kita, maka manajemen harus fokus pada variabel yang bisa dikendalikan 100%: Biaya Operasional.

- Pengelola Dapen wajib melakukan efisiensi operasional dan non-operasional secara ketat.
- Lakukan tinjauan ulang dan perbaikan pada *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk memangkas proses bisnis yang tidak efisien, mematkan digitalisasi, dan menekan kebocoran biaya. Penghematan biaya ini secara langsung akan mengompensasi tekanan pada pendapatan investasi, sehingga Laba Hasil Usaha Dapen tetap terjaga optimal.

KESIMPULAN

Dampak dari gejolak pasar keuangan global dan domestik di paruh pertama tahun 2026 ini tidak mungkin dihindari sepenuhnya. Namun, melalui manajemen risiko yang disiplin, langkah mitigasi yang taktis, serta reposisi portofolio yang cepat, dampaknya terhadap hasil investasi Dana Pensiun dapat ditekan hingga ke level seminimal mungkin. Pembaruan data makro secara berkala serta pembacaan arah kebijakan moneter-fiskal adalah menu wajib harian bagi pengelola aset. Dengan strategi hibrida bertahan di pasar saham berkualitas, agresif menangkap peluang *yield* di pasar uang, dan disiplin melakukan efisiensi internal industri Dana Pensiun diharapkan dapat melewati badai ini dengan selamat, demi menjamin masa depan para pesertanya. □



Oleh: Bambang Sri Mulyadi

Praktisi & Pemerhati Dana Pensiun

DAMPAK KENAIKAN TINGKAT SUKU BUNGA DAN INFLASI SERTA KURS USD TERHADAP IMBAL HASIL INVESTASI DANA PENSIUN

I. KONDISI KEUANGAN

Tingkat suku bunga acuan (BI Rate) dan Nilai tukar USD serta Inflasi

1. Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 19–20 Mei 2026. Selain itu, suku bunga *Deposit Facility* naik menjadi 4,25% dan suku bunga *Lending Facility* naik menjadi 6,00%, kenaikan tertinggi sejak tahun 2022, kenaikan tingkat suku bunga tersebut akan diikuti dengan kenaikan suku bunga Deposito Berjangka dan tingkat suku bunga kredit, hal tersebut akan memengaruhi kinerja keuangan para emiten dan investor yang menggunakan fasilitas kredit dan memanfaatkan kelonggaran dana ditempatkan pada Deposito Berjangka.
2. Pelemahan nilai tukar Rupiah (IDR) terhadap Dolar AS hingga akhir Mei 2026 menembus kisaran Rp.17.745 beli dan Rp.17.870 jual dan kurs tengah sebesar Rp.17.833,00 dan rekor tertinggi di bulan Mei 2026 berada pada kisaran Rp.17.900 hingga Rp.17.995,00 disebabkan oleh kombinasi tekanan ekonomi global dan domestik, Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS dan adanya fluktuasi nilai Dollar AS

akan memengaruhi kinerja keuangan emiten (importir) yang berusaha dengan harga pokok dengan nilai Dollar AS sedangkan penjualannya dengan menggunakan Rupiah.

3. Tingkat inflasi Indonesia pada awal Mei 2026 tercatat sebesar 2,42% secara tahunan (*year-on-year*) dan inflasi bulanan (*month-to-month*) sebesar 0,13% pada bulan Mei 2026 diperkirakan inflasi pada kisaran 2,93% - 3,05% (*year-on-year*) diperkirakan inflasi pada bulan Mei 2026 sebesar 0,40% Angka ini meningkat secara signifikan dari inflasi bulan April 2026 sebesar 0,13% dan berada dalam rentang target Bank Indonesia (antara 1,5% hingga 3,5%) dan secara jangka panjang BI menargetkan pada kisaran 2,5% ± 1% untuk tahun 2026 - 2027, inflasi relatif stabil sesuai dengan target Bank Indonesia.
4. *Review MSCI Global (Semi-Annual Index Review)* untuk Pasar Saham Indonesia dijadwalkan akan diumumkan pada 2 Agustus 2026 dan berlaku efektif mulai 1 September 2026.
5. S&P Global mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level **BBB/Stable/A-2**, namun memberikan peringatan terkait meningkatnya risiko tekanan fiskal akibat lonjakan biaya pembayaran bunga utang. Pandangan S&P terhadap pasar

modal Indonesia didorong oleh beberapa faktor utama:

- a. **Peringkat Layak Investasi (*Investment Grade*)** : Prospek yang stabil mencerminkan keyakinan S&P terhadap kapasitas ekonomi Indonesia dalam memenuhi kewajiban keuangannya.
- b. **Sentimen Tekanan Fiskal** : S&P menyoroti beban pembayaran utang yang lebih tinggi seiring meningkatnya biaya bunga, yang menjadi salah satu risiko utama bagi pergerakan dana investor.
- c. **Kebijakan Komoditas** : Lembaga ini juga menyoroti potensi risiko dari kebijakan sentralisasi ekspor yang dinilai dapat berdampak pada sektor pertambangan dan memengaruhi prospek peringkat secara keseluruhan.
- d. **Transparansi & Indeks** : Melalui divisi indeksnya (S&P Dow Jones Indices), mereka terus memantau tata kelola bursa dan transparansi kepemilikan saham untuk memastikan kualitas pasar tetap sehat.

II. DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN DALAM NEGERI

Terpengaruh oleh kejadian tersebut diatas berdampak pada keadaan Pasar Modal baik terhadap *yield* SBN maupun harga obligasi korporasi, antara lain



kenaikan *yield* SBN acuan 10 tahun pada Desember 2025 berkisar 6,12% - 6,11% dan *Yield* bulan Mei 2026 berkisar 6,78% - 6,72%, atau kenaikan imbal hasil sebesar 61 basis poin (bps) yang mencerminkan penurunan harga SBN diikuti dengan penurunan harga Obligasi Korporasi antara lain disebabkan penurunan kinerja keuangannya dilain pihak IHSG juga mengalami penurunan yang cukup signifikan terbukti bahwa IHSG per Desember 2025 sebesar Rp.8.646,94 dan pada akhir bulan Mei 2026 sebesar Rp.6.127,38 mengalami penurunan sebesar 29,14% yang mana diikuti pula indek saham LQ45 dan saham yang lain.

III. DAMPAK TERHADAP IMBAL HASIL INVESTASI DANA PENSIUN

Kondisi tersebut diatas akan berdampak yang sangat besar terhadap imbal hasil investasi Dana Pensiun, terutama Dana Pensiun yang mencatat portofolio SBN dan Obligasi Korporasi yang pencatatannya dengan AFS

(*Available For Sale*) atau Siap Untuk Dijual tentunya Selisih Penilaian Investasi Negatifnya semakin besar diperbesar dengan portofolio Saham yang SPI Negatifnya juga semakin membesar, sebagai gambaran secara industri kinerja keuangan (hasil usaha secara kualitatif) Dana Pensiun secara keseluruhan sampai dengan akhir triwulan I tahun 2026: (*sumber data statistik OJK*)

1. **Dana Pensiun (DDPK & DPLK)**
ROA : -0,13%; ROI (R) : 1,54%; ROI (R+U) : 0,02% dan BOPO : 9,89%
2. **DPPK PPMP**
ROA : -0,58%; ROI (R) : 1,60%; ROI (R+U) : -0,46% dan BOPO : 9,12%
3. **DPPK PPIP**
ROA : 0,44%; ROI (R) : 1,74%; ROI (R+U) : 0,56% dan BOPO : 5,95%
4. **DPLK**
ROA : 0,23%; ROI (R) : 1,41%; ROI (R+U) : 0,41% dan BOPO : 12,54%

Penurunan harga saham dan obligasi masih berlanjut sampai dengan akhir Juni 2026, tentu saja akan berdampak pada hasil usaha Dana Pensiun menurun dikarenakan Selisih Penilaian Investasi negatif semakin meningkat. Hal dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi Rencana Bisnis tahun 2026; batas waktu pada akhir Juni 2026; agar supaya Rentabilitas secara kuantitatif dan kualitatif dapat tercapai. Tentu saja Dewan Pengawas dan Pengurus harus dapat meyakinkan Pendiri bahwa perubahan Rencana Bisnis tersebut dikarenakan kondisi ekonomi dalam negeri dan global mengalami kontraksi yang berdampak pada imbal hasil Dana Pensiun di tahun 2026.

Disamping perubahan Rencana Bisnis agar supaya target dimaksud dapat dicapai Pengurus dan fungsinya harus meningkatkan kompetensi untuk menganalisa karakter portofolio investasi dan mengidentifikasi risiko yang melekat serta menghindari sektor-sektor yang sensitif dari perubahan regulasi. □



Oleh: **Abdul Hadi**
Presiden Direktur Dana Pensiun Telkom

MENIMBANG PERLUNYA KEBIJAKAN PENYANGGA PADA MASA GUNCANGAN MONETER DAN VOLATILITAS PASAR BAGI DANA PENSIUN

Menjaga Keseimbangan antara Kehati-hatian, Keberlanjutan, dan Perlindungan Peserta

UMUM

Ketidakpastian geopolitik, konflik regional, tekanan inflasi, kenaikan suku bunga serta volatilitas pasar keuangan sangat memengaruhi seluruh kelas aset investasi dana pensiun. Kondisi tersebut menuntut pengelola dana pensiun untuk ada langkah adaptif dalam mengelola risiko, dengan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian yang selama ini menjadi fondasi utama dana pensiun.

Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan yang layak untuk dikaji: apakah kerangka pengaturan dan pengawasan dana pensiun saat ini telah cukup adaptif untuk menghadapi gejala pasar yang bersifat sementara, sementara kewajiban dana pensiun pada dasarnya bersifat jangka panjang?

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mewajibkan pelanggaran regulasi ataupun pengurangan perlindungan peserta. Sebaliknya, tulisan ini mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan perlunya kebijakan penyangga yang mampu menjaga keseimbangan antara kehati-hatian, keberlanjutan program, dan perlindungan peserta di tengah lingkungan ekonomi yang semakin dinamis.



INDUSTRI DANA PENSIUN JUGA BERTRANSFORMASI

Salah satu perkembangan yang menarik untuk dicermati adalah perubahan jumlah dana pensiun dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2015 terdapat 213 dana pensiun yang beroperasi di Indonesia, terdiri dari 169 Dana Pensiun Program Manfaat Pasti (PPMP) dan 44 Dana Pensiun Program Iuran Pasti (PPIP). Pada tahun 2026 jumlah tersebut diperkirakan menjadi 150 dana pensiun, yang terdiri dari 116 PPMP dan 34 PPIP.

Dengan demikian, dalam kurun waktu sebelas tahun jumlah dana pensiun berkurang sekitar 30 persen. Penurunan terbesar terjadi pada program manfaat pasti yang turun lebih dari 31 persen.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa industri dana pensiun mengalami proses transformasi dan konsolidasi secara alami. Berbagai faktor dapat menjadi penyebabnya, mulai dari perubahan strategi perusahaan, efisiensi kelem-

bagaan, meningkatnya tuntutan tata kelola, kebutuhan digitalisasi, hingga tantangan keberlanjutan program manfaat pasti.

Dari perspektif tertentu, proses ini dapat dipandang sebagai bagian dari pendewasaan industri. Namun pada saat yang sama, tren tersebut juga memberikan sinyal bahwa pengelolaan dana pensiun semakin kompleks dan membutuhkan dukungan ekosistem yang semakin kuat.

INDUSTRI MASIH SEHAT DAN DIKELOLA SECARA PRUDENT

Di tengah berbagai tantangan tersebut, kondisi industri dana pensiun Indonesia secara umum masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik.

Data survei tingkat kesehatan dana pensiun secara *self assessment* oleh masing-masing Dapen menunjukkan bahwa sekitar 21 persen dana pensiun berada pada Tingkat Kesehatan 1 dan sekitar 70 persen berada pada Tingkat Kesehatan 2. Dengan demikian, sekitar 91 persen dana pensiun berada dalam kategori sehat.

Fakta ini penting untuk ditekankan. Tulisan mengenai kebijakan penyangga bukan dilatarbelakangi oleh kondisi industri yang sedang mengalami krisis. Sebaliknya, diskusi ini muncul karena industri secara umum berada dalam kondisi yang cukup sehat dan perlu dijaga keberlanjutannya dalam menghadapi tantangan masa depan.

Dengan kata lain, fokus utama bukanlah hal penyelamatan industri, melainkan penguatan daya tahan industri yang sudah relatif sehat agar mampu menghadapi perubahan lingkungan yang semakin cepat.

PENDANAAN MENGHADAPI TEKATAN SEMAKIN BESAR

Meskipun sebagian besar dana pensiun masih mampu menjalankan kewajibannya kepada peserta, tekanan terhadap kecukupan pendanaan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh perubahan lingkungan ekonomi dan pasar keuangan yang sangat berbeda dibandingkan dekade sebelumnya.

Ketidakpastian geopolitik, kenaikan

tingkat suku bunga, volatilitas pasar, serta kesulitan untuk mencari pertumbuhan telah memberikan tekanan terhadap nilai aset investasi dan kemampuan pendiri dalam mendukung program pensiun.

Bagi Dana Pensiun Program Manfaat Pasti, tantangan tersebut menjadi lebih kompleks karena harus menjaga keseimbangan antara kecukupan aset, kewajiban aktuarial, dan kemampuan pendanaan pemberi kerja.

Dalam kondisi pasar yang berfluktuasi, perubahan nilai pasar aset dapat berdampak langsung terhadap posisi pendanaan. Pada saat yang sama, perusahaan pendiri juga menghadapi tekanan bisnis akibat perlambatan ekonomi, peningkatan biaya operasional, dan disrupsi perubahan lanskap persaingan usaha. Kondisi tersebut menciptakan tantangan ganda bagi keberlanjutan program manfaat pasti.

Oleh karena itu, isu pendanaan tidak lagi semata-mata menjadi persoalan teknis aktuarial, tetapi telah menjadi bagian dari diskusi strategis mengenai keberlanjutan dana pensiun dalam jangka panjang.

PORTOFOLIO INVESTASI MENUNJUKKAN KARAKTER INVESTOR JANGKA PANJANG

Komposisi investasi dana pensiun memberikan gambaran yang menarik mengenai profil risiko industri.

Statistik portofolio investasi secara umum seluruh Dapen DPPK mencerminkan sekitar 43 persen portofolio ditempatkan pada Surat Berharga Negara (SBN), sementara sekitar 22 persen berada pada obligasi korporasi.

Dengan demikian, lebih dari 64 persen aset investasi dana pensiun berada pada instrumen pendapatan tetap.

Sementara itu pasar uang mencapai 12,2 persen, Saham sekitar 9 persen, Tanah dan bangunan sekitar 7 persen; Penyertaan langsung sekitar 6 persen; Reksa dana sekitar 2,6 persen.

Struktur portofolio tersebut menunjukkan bahwa dana pensiun Indonesia secara umum menerapkan pendekatan investasi yang konservatif dan berorientasi jangka panjang.

Namun terdapat konsekuensi yang perlu dipahami. Dominasi instrumen pendapatan tetap membuat industri dana pensiun sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga dan pergerakan *yield* obligasi. Ketika suku bunga meningkat, nilai pasar obligasi cenderung mengalami penurunan. Dalam kondisi tersebut akan memengaruhi nilai aset dan posisi pendanaan, meskipun kemampuan jangka panjang dana pensiun belum tentu berubah secara fundamental.

ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM) SUDAH MENJADI PRAKTIK BAGI DANA PENSIUN

Salah satu indikator penting dalam pengelolaan dana pensiun adalah ALM. Survei menunjukkan bahwa sekitar 89 persen dana pensiun telah melaksanakan kesesuaian ALM. Angka tersebut mencerminkan bahwa mayoritas pengelola dana pensiun telah berupaya menyelaraskan strategi investasi dengan karakteristik kewajiban yang dimiliki. Kondisi ini memberikan pesan yang baik.

Tekanan yang dihadapi industri saat ini tidak berasal dari tata kelola atau pengelolaan investasi yang kurang baik. Sebagian besar dana pensiun justru telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko yang memadai.

Oleh karena itu, ketika volatilitas pasar memberikan dampak terhadap pendanaan dan nilai aset, faktor eksternal sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan faktor internal.

MENIMBANG APAKAH PERLU DIBERIKAN KEBIJAKAN PENYANGGA OLEH REGULATOR

Dalam konteks tersebut, terdapat ruang untuk mendiskusikan beberapa kebijakan penyangga yang dapat membantu meningkatkan keberlanjutan industri tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.

Pertama, Memisahkan tingkat pendanaan dari penilaian kinerja pengelola dana pensiun. Saat ini tekanan pendanaan sering dipersepsikan sebagai indikator buruknya pengelolaan dana pensiun. penurunan tingkat pendanaan pada periode tertentu tidak selalu

mencerminkan kegagalan pengelola dana pensiun, tetapi dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar yang berada di luar kendali pengelola. Kajian terhadap mekanisme pemulihan pendanaan pada kondisi volatilitas pasar yang ekstrem, tujuannya bukan mengurangi kewajiban pendiri, tetapi memastikan proses pemulihan dapat dilakukan secara realistis, dapat dipahami para *stakeholder*.

Kedua, Penguatan penilaian berbasis tata kelola dan manajemen Risiko. Dana Pensiun pada dasarnya adalah institusi jangka panjang. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan seharusnya tidak hanya dinilai dari posisi pendanaan pada satu titik waktu tertentu.

Ketiga, Pendekatan pengawasan yang lebih proporsional terhadap defisit pendanaan. Dalam kondisi pasar yang bergejolak, perubahan nilai pasar aset dapat menyebabkan penurunan tingkat pendanaan secara signifikan dalam waktu singkat. Apabila seluruh kondisi tersebut diperlakukan sama, maka dapat muncul persepsi negatif yang tidak selalu mencerminkan kondisi fundamental Dana Pensiun.

Keempat, Fleksibilitas pemenuhan iuran tambahan. Bagi Pendiri atau Pemberi kerja yang sedang mengalami tekanan bisnis maka fleksibilitas jadwal pemenuhan iuran tambahan dalam kondisi tertentu akan sangat relevan.

Kelima, Perlakuan akuntansi yang lebih mencerminkan karakteristik jangka Panjang dana pensiun. Dana pensiun merupakan institusi yang mengelola kewajiban jangka panjang dengan horizon puluhan tahun. Namun dalam praktiknya, nilai aset investasi pada laporan keuangan dapat mengalami fluktuasi yang cukup besar akibat perubahan kondisi pasar dalam jangka pendek.

Kenaikan tingkat suku bunga, perubahan *yield* obligasi, maupun koreksi pasar saham dapat menyebabkan penurunan nilai pasar aset investasi secara signifikan meskipun kualitas fundamental aset tersebut

tidak mengalami perubahan. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi transparansi laporan keuangan maupun menunda pengakuan risiko investasi. Sebaliknya, tujuannya adalah mengeksplorasi kemungkinan pendekatan pelaporan yang mampu memberikan gambaran yang lebih proporsional mengenai kondisi jangka panjang dana pensiun, khususnya ketika terjadi gejolak pasar yang bersifat sementara.



PENUTUP

Dana pensiun merupakan institusi yang dibangun untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Karena itu, keberhasilannya tidak dapat diukur hanya dari kondisi pasar dalam satu atau dua tahun tertentu.

Data menunjukkan bahwa industri dana pensiun Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang relatif sehat, memiliki tata kelola yang semakin baik, menerapkan ALM secara luas, serta berkontribusi signifikan dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Namun demikian, penurunan jumlah dana pensiun, meningkatnya tekanan pendanaan, perubahan struktur demografi, dan volatilitas pasar keuangan menunjukkan bahwa tantangan keberlanjutan tidak dapat diabaikan.

Oleh karena itu, kajian mengenai perlunya kebijakan penyangga pada masa volatilitas pasar menjadi relevan untuk didiskusikan bersama. Bukan untuk mengurangi prinsip kehati-hatian, melainkan untuk memastikan bahwa sistem dana pensiun Indonesia tetap kuat, berkelanjutan, dan mampu menjalankan perannya sebagai penjaga kesejahteraan hari tua masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. □

PENDAHULUAN

Ketidakpastian geopolitik global kembali menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas pasar keuangan dunia sepanjang tahun 2026. Konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya ketegangan terkait Selat Hormuz, perang Rusia-Ukraina, hingga rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pacific telah meningkatkan volatilitas pasar global dan menciptakan tekanan terhadap berbagai instrumen investasi. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi industri dana pensiun yang memiliki karakteristik investasi jangka panjang dan berorientasi pada kesinambungan pembayaran manfaat pensiun.

Dalam paparan “Menghadapi Ketidakpastian Geopolitik: Strategi Manajemen Risiko Dana Pensiun”, dijelaskan bahwa dana pensiun pada dasarnya memiliki siklus investasi jangka panjang yang dimulai dari fase akumulasi, stabilisasi, hingga *decumulation period* atau fase pembayaran manfaat pensiun. Oleh karena itu, pengelolaan investasi dana pensiun tidak hanya berorientasi pada *return*, tetapi juga harus mempertimbangkan kestabilan likuiditas, kualitas aset, dan kesesuaian dengan profil kewajiban jangka panjang.

DAMPAK DAN MITIGASI BAGI DANA PENSIUN

Kondisi geopolitik terkini memberikan tekanan besar terhadap perekonomian global maupun domestik. Penutupan Selat Hormuz yang mengganggu sekitar 20–30% pasokan minyak dunia menyebabkan harga minyak Brent melonjak signifikan hingga mencapai lebih dari USD 100 per barel. Dampaknya sangat terasa bagi Indonesia sebagai negara net importir minyak. Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga energi meningkatkan risiko inflasi, memperbesar potensi defisit APBN, serta meningkatkan tekanan terhadap suku bunga domestik.

Tekanan ekonomi tersebut kemudian ditransmisikan langsung ke pasar keuangan Indonesia. Pada pasar saham, investor asing melakukan aksi jual besar-besaran sehingga menyebabkan IHSG mengalami



Oleh: **Chairi Pitono**,
Presiden Direktur Dana Pensiun Astra Dua

RISIKO INVESTASI DANA PENSIUN DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GEOPOLITIK GLOBAL

penurunan tajam. Saham-saham berkapitalisasi besar yang selama ini menjadi instrumen utama investasi dana pensiun, terutama sektor perbankan seperti BBKA, BBRI, BMRI, dan BBNI, mengalami koreksi signifikan. Selain itu, berbagai reksa dana saham juga mencatatkan penurunan kinerja akibat meningkatnya volatilitas pasar.

Di pasar obligasi, kondisi tidak jauh berbeda. Kenaikan *yield* Surat Berharga Negara (SBN) akibat *outflow* investor asing menyebabkan harga obligasi mengalami tekanan. Hal ini berdampak pada penurunan nilai portofolio obligasi yang dimiliki dana pensiun, khususnya obligasi yang dicatat sebagai *available for sale* (AFS). Pada saat yang sama, risiko gagal bayar obligasi korporasi juga meningkat seiring tekanan ekonomi terhadap sektor usaha tertentu.

Dalam konteks tersebut, penerapan manajemen risiko menjadi faktor yang sangat krusial. Regulasi melalui POJK Nomor 28 Tahun 2025 menegaskan bahwa dana pensiun wajib menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh melalui empat pilar utama, yaitu:

- pengawasan aktif pengurus dan dewan pengawas,
- kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko,
- kecukupan proses identifikasi dan pengendalian risiko,
- sistem pengendalian internal yang efektif.

Risiko utama yang dihadapi dana pensiun dalam kondisi saat ini meliputi risiko strategis, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Risiko strategis muncul akibat berubahnya asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan rencana bisnis, seperti kenaikan *yield* SBN, pelemahan rupiah, serta perubahan proyeksi pasar saham dari positif menjadi negatif.

Sementara itu, risiko pasar terlihat dari penurunan harga saham dan obligasi akibat volatilitas pasar yang tinggi. Risiko kredit meningkat karena adanya potensi gagal bayar obligasi korporasi, sedangkan risiko likuiditas dapat muncul apabila dana pensiun mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun akibat tekanan arus kas dan penurunan nilai investasi.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, dana pensiun perlu melakukan berbagai langkah mitigasi risiko secara adaptif. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan *review* berkala terhadap asumsi ekonomi dan rencana bisnis.
2. Menyesuaikan alokasi aset sesuai *risk appetite* dan kondisi pasar terkini.
3. Memperkuat diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko konsentrasi.
4. Memperbesar porsi instrumen likuid dan defensif pada periode volatilitas tinggi.
5. Memperketat analisis fundamental ter-

hadap obligasi korporasi dan emiten saham.

6. Melakukan *asset liability management* (ALM) secara lebih disiplin untuk menjaga kecukupan likuiditas pembayaran manfaat pensiun.

Selain itu, penguatan tata kelola risiko juga menjadi hal penting. Pengurus dan dewan pengawas perlu aktif melakukan evaluasi profil risiko, memastikan efektivitas fungsi manajemen risiko, serta membangun budaya risiko di seluruh organisasi. Pengambilan keputusan investasi tidak lagi cukup hanya berdasarkan potensi *return*, tetapi harus mempertimbangkan skenario terburuk dan ketahanan portofolio terhadap *shock* geopolitik global.

PENUTUP

Pada akhirnya, kondisi geopolitik global saat ini menunjukkan bahwa risiko investasi tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin, terukur, dan adaptif. Dana pensiun sebagai institusi pengelola dana jangka panjang harus mampu menjaga keseimbangan antara pencapaian hasil investasi dan keberlanjutan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta. Dalam situasi penuh ketidakpastian, kehati-hatian, diversifikasi, dan tata kelola risiko yang kuat menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan dana pensiun. □



Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun,
5 - 7 Mei 2026



Pelatihan Manajemen Pendanaan dan Kepesertaan
Dana Pensiun, 11 - 12 Mei 2026



Pelatihan Manajemen Investasi Dana Pensiun,
12 - 13 Mei 2026



Pelatihan KKNJ Jejang 4 Bidang Dana Pensiun,
18 - 19 Mei 2026



Pelatihan KKNJ Jenjang 7 Bidang Dana Pensiun,
19 - 20 Mei 2026



Pelatihan KKNJ Jenjang 6 Sub Bidang Pengawasan
Dana Pensiun, 21 - 22 Mei 2026



Pelatihan Manajemen Teknologi Informasi Dana Pensiun,
25 - 26 Mei 2026



SEMINAR "PENGUATAN STRATEGI INVESTASI DANA Pensiun MELALUI OUTLOOK EKONOMI, PENDEKATAN LIABILITY DRIVEN INVESTMENT (LDI), DAN TATA KELOLA AKUNTANSI YANG BERKELANJUTAN"

[12 MEI 2026]





Fact-Finding Mission OECD Bidang Asuransi dan Dana Pensiun

Dalam rangka mendukung proses akses Indonesia sebagai anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan kegiatan Fact-Finding Mission OECD Bidang Asuransi dan Dana Pensiun pada tanggal 5 Juni 2026. Melalui peninjauan langsung dan dialog bersama tim OECD, partisipasi aktif perwakilan dari Asosiasi Dana Pensiun Indonesia pada sesi ini menegaskan komitmen industri Dana Pensiun Pemberi Kerja dalam menyelaraskan praktik domestik dengan standar global.



Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun,
2 - 4 Juni 2026



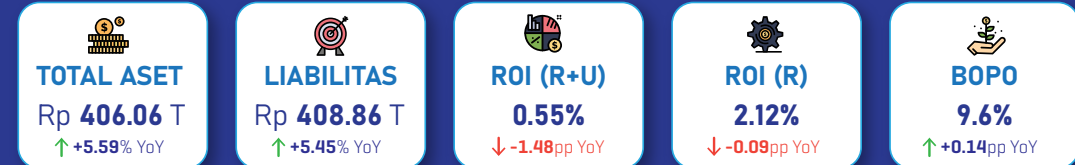
Pelatihan Akuntansi dan Perpajakan Dana Pensiun,
9 - 10 Juni 2026



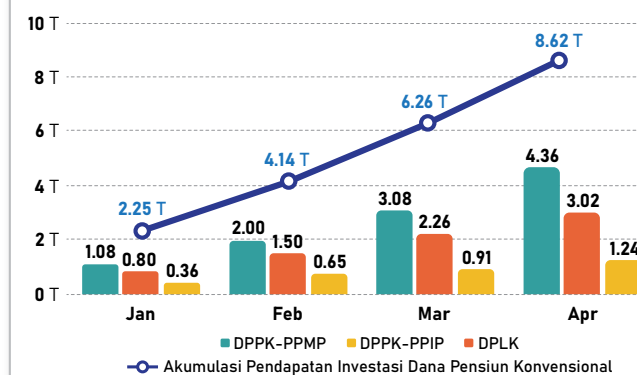
Pelatihan KKNJ Jenjang 4 Bidang Dana Pensiun,
9 - 10 Juni 2026

Kinerja Dana Pensiun Konvensional

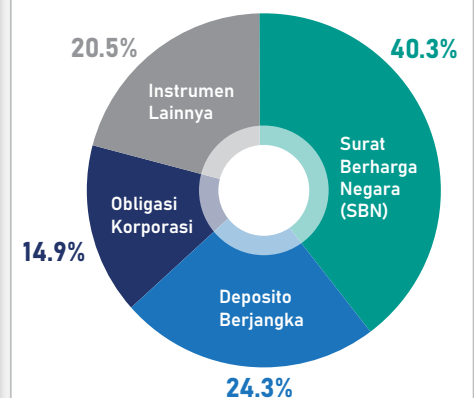
DPPK-PPMP • DPPK-PPIP • DPLK | Periode: s/d April 2026



Pendapatan Investasi

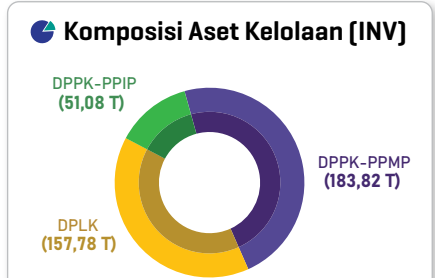
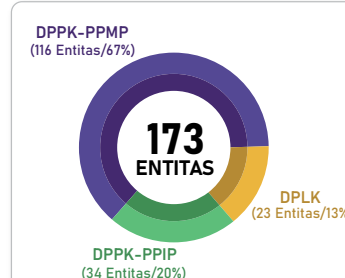


Portofolio Investasi



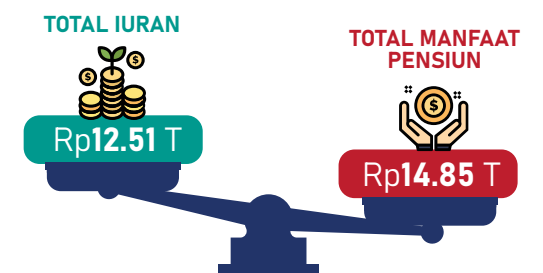
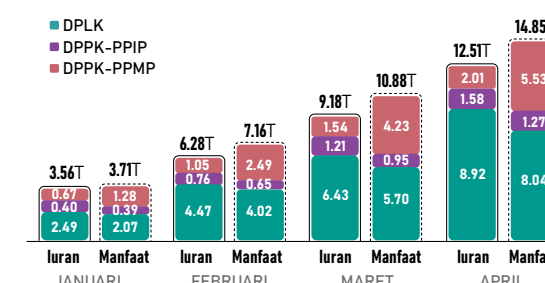
Profil Dana Pensiun Konvensional

DPPK-PPMP • DPPK-PPIP • DPLK | April 2026



Perkembangan Iuran vs Manfaat

Akumulasi Januari - April 2026



PENGUATAN DANA PENSIUN DENGAN PROGRAM MANFAAT PASTI MELALUI STRATEGI *LIABILITY DRIVEN INVESTMENT* (LDI) DAN TATA KELOLA AKUNTANSI YANG BERKELANJUTAN

Pada tanggal 12 Mei 2026, bertempat di Wisma 46 Kota BNI Jakarta, ADPI menyelenggarakan acara seminar dengan topik “Penguatan Strategi Investasi Dana Pensiun melalui *Outlook* Ekonomi, Pendekatan LDI dan Tata Kelola Akuntansi yang Berkelanjutan”.

Dana pensiun yang mengelola program manfaat pasti, baik global maupun di Indonesia, menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Faktor risiko tersebut antara lain berupa risiko *longevity* akibat meningkatnya usia harapan hidup, risiko pasar akibat meningkatnya indeks volatilitas pasar keuangan, risiko suku bunga akibat tren penurunan suku bunga dalam jangka panjang yang berdampak pada meningkatnya kewajiban dan menurunnya tingkat reinvestasi, semakin terbatasnya kapasitas risiko akibat semakin memendeknya horizon investasi akibat menuanya profil demografi peserta karena inisiatif *de-risking* yang menyebabkan tidak terdapatnya penambahan peserta baru, serta menurunnya kemampuan dukungan pendanaan Pendiri akibat kompetisi dan disrupsi bisnis.

Tanpa disiplin tata kelola dan manajemen risiko yang efektif, pengelolaan investasi dana pensiun dapat terjebak pada orientasi pada pencapaian *return*



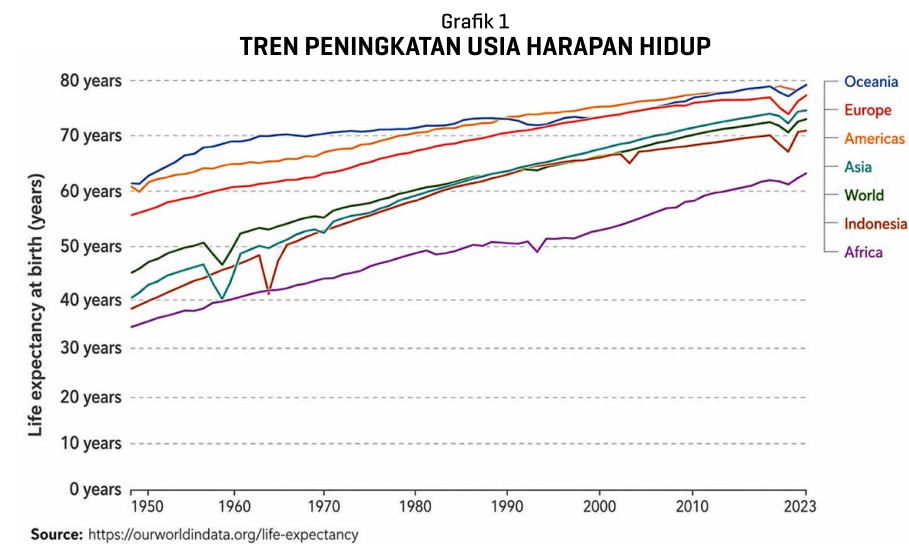
investasi dalam jangka pendek, namun justru dengan mengorbankan penciptaan nilai secara berkelanjutan dalam jangka panjang karena *return* investasi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan membaiknya kondisi pendanaan dana pensiun. Padahal tujuan utama dana pensiun bukan sekadar menghasilkan *return* tinggi dalam jangka pendek tanpa dikaitkan dengan kewajiban, melainkan memastikan optimalisasi untuk kesinambungan pembayaran manfaat peserta dalam koridor kapasitas dan *appetite* risiko Pendiri.

Salah satu bentuk implementasi manajemen risiko adalah inisiatif *de-risking* atau pengurangan risiko yang antara lain bisa berbentuk pembubaran program (untuk selanjutnya dialihkan ke program iuran pasti), tidak adanya penambahan peserta baru, perubahan program ke iuran pasti sejak tanggal *cut off* tertentu, dan atau implementasi *Liability Driven Investment* (LDI).

Outlook ekonomi dalam jangka pendek dan menengah juga sangat penting untuk menentukan strategi investasi dana pensiun agar investasi dana pensiun dapat lebih memanfaatkan momentum dan siklus ekonomi untuk optimalisasi. Namun demikian harus tetap dilakukan dalam konteks dan kerangka investasi LDI untuk menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang.



Siti Rakhmawati
Direktur Investasi & Keuangan
Dana Pensiun Telkom,
Head of Advocacy CFA Society Indonesia



STRATEGI LDI

Investasi berbasis kewajiban bertujuan untuk mencari keseimbangan antara investasi yang ditujukan untuk mencari pertumbuhan namun dengan risiko ketidaksesuaian terhadap kewajiban (seperti instrumen saham dan properti) dengan investasi yang sesuai dengan kewajiban namun memiliki ekspektasi *return* yang relatif lebih rendah (seperti instrumen efek berpendapatan tetap/obligasi serta instrumen yang bersifat lindung nilai). Hal ini ditujukan untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang (karena tidak terlalu agresif) namun juga tidak terlalu mahal sehingga Pendiri tidak sanggup menanggung risiko pendanaannya (karena terlalu konservatif).

Saat ini masih terdapat sebagian persepsi yang bersifat terlalu menyederhanakan bahwa strategi LDI dengan instrumen efek berpendapatan tetap dapat dilakukan hanya dengan melakukan pembelian obligasi dengan prioritas profil jatuh tempo disesuaikan dengan profil jatuh tempo kewajiban dari yang paling dekat secara *first come first served* basis.

Namun narasumber seminar LDI, Randy Sugiharto, CFA menyampaikan bahwa strategi tidak hanya sesederhana *cash flow matching*. Dalam praktik global, strategi LDI tidak hanya mencakup pemadanan *cash flow* antara aset dan kewajiban, namun juga pemadanan durasi

atau sensitivitas terhadap perubahan suku bunga.

Laporan OECD menyebutkan bahwa risiko suku bunga merupakan salah satu risiko terbesar dari program dana pensiun manfaat pasti. Kita pun dapat belajar dari cerita-cerita ketidakberlanjutan program dana pensiun dan asuransi global akibat karena kurang efektifnya pengelolaan risiko suku bunga. Dalam Grafik 2 dan 3 dapat terlihat tren penurunan bunga dalam jangka panjang.

Dengan demikian, tujuan LDI bukan sekadar menjaga stabilitas nilai aset, tetapi menjaga stabilitas ekonomi *funding ratio* dalam jangka panjang. Terlebih secara tipikal, durasi/sensitivitas terhadap suku bunga dari kewajiban dana pensiun relatif lebih besar dibanding durasi/sensitivitas terhadap suku bunga dari aset. Apabila terdapat gap durasi antara aset dan kewajiban maka kewajiban aktuarial dapat meningkat lebih tinggi dibanding kenaikan aset pada kondisi tren penurunan suku bunga dalam jangka panjang yang jamak terjadi pada negara sedang berkembang.

Fokus pada stabilitas aset semata dalam jangka pendek, tidak akan menciptakan ketahanan dan pertumbuhan rasio kecukupan dana terhadap perubahan suku bunga, yang terjadi justru volatilitas dan penurunan rasio kecukupan dana sehingga meningkatkan beban pendanaan bagi Pendiri dan atau menurunkan

keamanan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta.

Sehingga strategi LDI dengan menggunakan instrumen efek berpendapatan tetap harus mempertimbangkan kedua strategi sebagai berikut:

1. *Cash Flow Matching Strategy*

Strategi ini bertujuan menyelaraskan arus kas aset dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, sebagai upaya untuk memitigasi risiko likuiditas di mana dana pensiun tidak dapat membayar kewajiban yang jatuh tempo. Aset untuk strategi *cashflow matching* yang berfokus pada kesesuaian kupon dan jadwal jatuh tempo obligasi untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat dapat dicatat pada nilai *amortized cost*, tentunya dengan tata kelola manajemen yang disiplin.

Instrumen yang umum digunakan meliputi efek berpendapatan tetap antara lain obligasi pemerintah dan obligasi korporasi,

Kelebihan pendekatan ini adalah risiko *mismatch* yang rendah dan kepastian pembayaran yang tinggi. Namun tantangannya adalah keterbatasan instrumen tenor panjang dan *yield* yang relatif rendah. Tingginya pendapatan kupon juga berdampak pada semakin rendahnya durasi aset.

2. *Duration Matching Strategy*

Pendekatan ini berfokus pada pengurangan kesenjangan durasi antara aset dan kewajiban. Strategi ini merupakan upaya untuk memitigasi risiko suku bunga sehingga aset dan kewajiban diharapkan bergerak pada arah dan *magnitude* yang sama sehingga mengurangi sensitivitas rasio kecukupan dana terhadap perubahan suku bunga.

Aset yang berdurasi panjang antara lain obligasi pemerintah dan korporasi yang tenornya panjang dan sedikit dan atau tidak membayar kupon (*zero coupon*), atau produk *derivative* yang ditujukan untuk lindung nilai risiko suku bunga. *Supply* instrumen ini masih sangat jarang di Indonesia.

Salah satu syarat implementasi strategi *duration matching* adalah per-

lunya *rebalancing* secara aktif, serta pencatatannya menggunakan nilai pasar agar nilai aset dapat mencerminkan pergerakan *yield* pasar. Konsekuensi dari strategi ini adalah aset dan RKD akan lebih berfluktuasi dalam jangka pendek, namun akan lebih efektif menjaga stabilitas *funding ratio* dalam jangka panjang, terutama dalam hal terdapat tren penurunan bunga dalam jangka panjang.

3. Kombinasi antara Cashflow Matching & Duration Matching Strategy

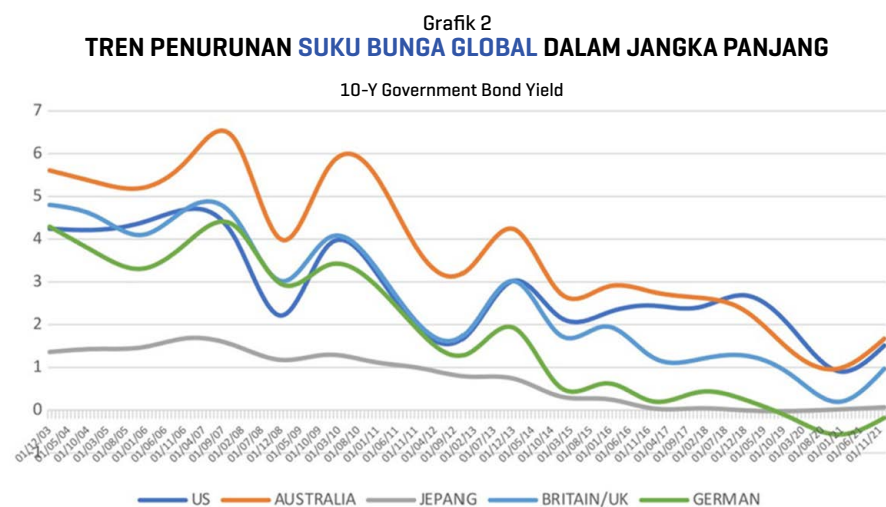
Dalam strategi investasi efek berpendapatan tetap, optimalisasi dapat diupayakan melalui kombinasi antara kedua strategi di atas sehingga terdapat optimalisasi antara pengelolaan risiko likuiditas dan Risiko suku bunga, yaitu melalui strategi *cashflow matching* untuk mitigasi risiko kegagalan pembayaran manfaat pensiun serta strategi *duration matching* untuk meningkatkan ketahanan rasio kecukupan dana akibat Risiko penurunan suku bunga dalam jangka panjang.

Pendekatan ini memberikan potensi *return* yang lebih baik, namun membutuhkan tata kelola risiko yang lebih kuat. Dalam implementasinya, terdapat beberapa parameter utama antara lain parameter risiko kesesuaian durasi (sensitivitas terhadap suku bunga) antara aset versus kewajiban serta kesesuaian arus kas aset versus kewajiban, serta *benchmark* pengukuran kinerja yang sesuai.

TATA KELOLA AKUNTANSI

Implementasi strategi LDI juga sangat membutuhkan tata kelola dalam hal akuntansi. Saat ini masih terdapat persepsi yang beragam atas standar akuntansi yang mengatur investasi dana pensiun. Narasumber Bapak Yakub dari DSAK IAI mengangkat isu di industri dana pensiun berupa perbedaan penafsiran atas standar akuntansi khususnya dalam hal praktik pencatatan instrumen *fixed income*.

Disampaikan bahwa standar akuntansi untuk investasi dana pensiun adalah PSAK 18 yang tidak mengenal pengelompokan HTM (*Held to Maturity*), AFS (*Available for Sale*) serta *Trading*.



PSAK 18 juga tidak mengatur apakah suatu aset boleh dijual, dan seterusnya.

Sebagai upaya mitigasi terhadap risiko pasar berupa fluktuasi aset dalam jangka pendek, terdapat kecenderungan dan praktik umum bahwa investasi efek berpendapatan “dimasukkan dalam kelompok atau *held-to-maturity* (HTM)” atau dicatat pada nilai pennebusan akhir dan tidak dapat dijual sebelum jatuh tempo.

Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh persepsi bahwa strategi LDI hanyalah *cashflow matching* (tidak termasuk *duration matching* atau kombinasinya). Salah satu klausul dalam PSAK 18 membolehkan pengecualian pencatatan aset efek berpendapatan tetap untuk DAPAT tidak dicatat pada nilai pasar (yaitu dicatat pada nilai pennebusan akhir) adalah apabila aset tersebut dipadankan dengan kewajiban.

Dalam Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.05/2024 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, malah menyatakan apabila aset efek berpendapatan tetap dipadankan dengan kewajiban, maka dicatat pada nilai pennebusan akhir (seolah-olah tidak bersifat opsional yang membuka ruang untuk strategi LDI selain strategi *cashflow matching*).

Sekali lagi, kelebihan dari pencatatan pada nilai pennebusan akhir memang relatif lebih memberikan stabilitas aset dalam jangka pendek. Namun kekurangannya adalah tidak sepenuhnya mencerminkan sensitivitas ekonomi terhadap

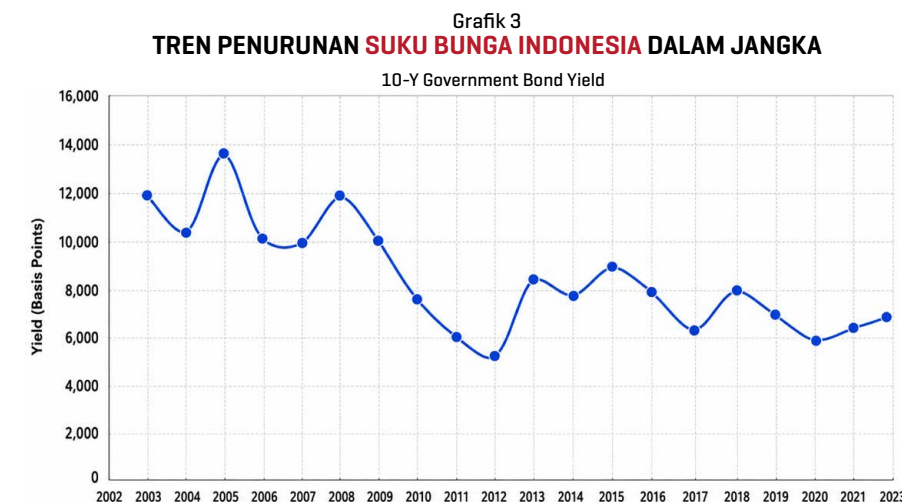
perubahan suku bunga.

Sehingga apabila terjadi penurunan suku bunga secara signifikan dalam jangka panjang, maka nilai aset dan RKD akan *undervalued* karena pencatatan aset tidak mengalami kenaikan untuk mengimbangi kenaikan kewajiban dana pensiun seiring penurunan suku bunga.

Sebaliknya, pencatatan pada nilai pasar memberikan gambaran ekonomi yang lebih relevan dan *market-consistent*, namun meningkatkan volatilitas aset dan RKD dalam jangka pendek.

Trade-off antara stabilitas laporan dan relevansi ekonomi inilah yang menjadi tantangan utama pengelola dana pensiun. Narasumber seminar menyarankan jalan Tengah berupa kombinasi pencatatan pada nilai amortisasi untuk aset pada strategi *cash flow matching* dan pada nilai pasar untuk aset pada strategi *duration matching*.

Narasumber DSAK IAI juga menyampaikan persepsi bahwa aset yang dicatat dengan metode nilai pennebusan akhir tidak dapat dijual atau direklasifikasi sebelum jatuh tempo kecuali apabila terdapat kondisi tertentu yang sangat ketat. Persepsi ini sering dianggap membatasi fleksibilitas pengelolaan portofolio. Persepsi ini dikonfirmasi sebagai kurang tepat karena standar akuntansi tidak pernah mengatur hal ini. Sebaliknya ini merupakan ranah manajemen yang harus membuat tata kelola akuntansi sehingga dapat mendukung strategi



manajemen dalam koridor konsistensi laporan keuangan.

Dalam industri Dana Pensiun juga terdapat isu keterbandingan RKD yang kurang tepat karena perbandingan RKD antar dana pensiun sering kali dilakukan secara langsung, padahal terdapat metode pencatatan dan asumsi aktuarial yang berbeda, khususnya asumsi bunga teknis. Akibatnya, hasil perbandingan belum tentu sepenuhnya *comparable* dan dapat menimbulkan interpretasi yang kurang tepat. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi, konsistensi metodologi, serta peningkatan pemahaman *stakeholder* terhadap konteks pengukuran risiko dana pensiun.

Narasumber DSAK IAI menyampaikan bahwa standar akuntansi tidak pernah mengatur formula untuk pengukuran kecukupan dana, melainkan hal tersebut adalah ranah dari regulator. Salah satu opsi agar RKD antar Dapen lebih *comparable* adalah pengukuran RKD dengan menggunakan nilai pasar untuk seluruh aset efek berpendapatan tetap, serta penggunaan *yield* pasar sebagai acuan dan pengukuran kewajiban Dana Pensiun.

BELAJAR DARI INDUSTRI ASURANSI

Industri asuransi dapat menjadi *benchmark* penting dalam pengembangan praktik LDI di dana pensiun. Beberapa praktik yang telah berkembang di industri asuransi antara lain:

- Penerapan *Asset Liability Management* (ALM),
- Segmentasi *matching portfolio* dan *investment portfolio*,
- Penggunaan *market-consistent valuation*, serta
- Pengelolaan sensitivitas suku bunga yang lebih terintegrasi.

Pendekatan *hybrid* yang memisahkan *matching portfolio* dan *investment portfolio* dapat menjadi salah satu referensi yang relevan bagi dana pensiun Indonesia.

PENGUATAN TATA KELOLA SEBAGAI KUNCI

Keberhasilan implementasi LDI tidak hanya bergantung pada strategi investasi, tetapi juga pada kualitas tata kelola.

Beberapa aspek penting yang perlu diperkuat antara lain:

- Kejelasan tujuan investasi,
- Integrasi fungsi investasi, aktuarial, dan akuntansi,
- Penguatan *risk management framework*,
- Peningkatan kompetensi SDM, serta
- Transparansi pelaporan dan pengukuran risiko.

Tanpa *governance* yang kuat, implementasi LDI justru dapat meningkatkan kompleksitas dan risiko pengelolaan dan gagal menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

PENUTUP

Ke depan, industri dana pensiun Indonesia perlu bergerak menuju pendekatan pengelolaan yang lebih terintegrasi antara investasi, aktuarial, dan akuntansi.

LDI bukan sekadar strategi berinvestasi pada efek berpendapatan tetap yang di-*matching*-kan *cashflow*-nya secara *first come first served* basis dengan kewajiban dan dicatat pada nilai pennebusan akhir untuk menghindari fluktuasi aset dalam jangka pendek serta kinerjanya dibandingkan dengan *peer*, target nominal yang *predetermined* dan atau *market index*.

Tata kelola dan transformasi cara berpikir dalam pengelolaan dana pensiun jangka panjang sesuai praktik terbaik perlu diterapkan sehingga fokus utama tidak lagi hanya pada pencapaian *return* dan stabilitas aset dalam jangka pendek tetapi pada kemampuan menjaga stabilitas pendanaan dan kesinambungan pembayaran manfaat peserta.

Melalui penguatan strategi investasi berbasis *Liability Driven Investment*, penerapan tata kelola yang *prudent*, serta peningkatan konsistensi standar akuntansi, dana pensiun Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem pendanaan yang lebih resilien, transparan, dan berkelanjutan.

Selain disebabkan oleh kurang tepatnya indikator risiko dan pengukuran kinerja investasi yang terlalu berfokus pada *return*, keterbatasan Instrumen LDI juga menjadi kendala bagi implementasi strategi LDI yang efektif.

Pasar domestik masih menghadapi keterbatasan instrumen obligasi *zero coupon* tenor panjang dan instrumen *hedging* suku bunga. Pendalaman pasar sangat dibutuhkan agar strategi LDI dapat diimplementasikan dengan efektif, demi kesinambungan industri dana pensiun dalam jangka panjang.

Mengutip laporan World Economic Forum (WEF), persiapan dana pensiun menjadi sangat mendesak karena usia harapan hidup yang terus meningkat, yang jika tidak diantisipasi dapat memicu krisis kesejahteraan di masa depan. □



Oleh: **Nugroho Dwi Priyohadi**
Direktur Dapen Pelindo Purnakarya,
Alumnus S3 PIO Universitas Airlangga

SMART SAVING, SPENDING, & INVESTING

Catatan Kegiatan ADPI Goes To Campus

Pada tanggal 22 April 2026, DPP ADPI (Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia) menghadirkan Bapak Budi Sutrisno, BEc, MM, CFIA, CRP, dalam acara *ADPI Goes To Campus* di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Beliau merupakan Wakil Ketua Bidang Edukasi dan Kompetensi DPP ADPI sekaligus Direktur Utama Dapen BCA.

Acara yang dipandu oleh Prof. Dr. Apriani Dorkas Rambu Atahau, S.E., M.Com., Ph.D. sebagai moderator ini berlangsung meriah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh tidak kurang dari 150 peserta yang sangat antusias, mulai dari unsur mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, hingga pihak eksternal.

Acara GTC di UKSW merupakan salah satu bagian dari fungsi sosialisasi literasi keuangan Perkumpulan ADPI kepada masyarakat khususnya dilingkungan kampus.

Beberapa pokok-pokok penting dalam paparan tersebut adalah:

1. MOTIVASI SEKOLAH DAN PENGEMBANGAN DIRI

Layaknya sebuah aktivitas olahraga, Bapak Budi mengawali materi dengan sesi pemanasan (*warming up*) terkait motivasi bersekolah. Mengusung judul “*Build a Professional Legacy*”, beliau mengarahkan program ini pada

materi pembangunan jejak karier yang bermakna, berdampak, dan dikenang.

“Sekolah bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah batu loncatan untuk membuka wawasan dan logika berpikir,” ungkapnya di hadapan para peserta.

Para peserta tampak serius menyimak pemaparan narasumber mengenai berbagai alternatif jalur pasca sekolah. Seseorang dapat memilih untuk menjadi:

- **Profesional:** Bekerja di perusahaan, menjadi direktur, karyawan, konsultan, dosen, hingga anggota TNI/Polri/ASN.
- **Entrepreneur:** Menjadi pengusaha atau wirausahawan.
- **Pekerja Seni/Budaya:** Menekuni hobi yang sesuai dengan *passion*, seperti seniman atau desainer.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan pentingnya menanamkan pola pikir bertumbuh (*growth mindset*), prinsip pantang menyerah (*never give up*), selalu optimis, serta terus berusaha mengukir jejak profesional sejak masa perkuliahan.

Setelah sesi pemanasan mengenai dunia sekolah dan arah impian masa depan, Bapak Budi yang telah malang melintang di dunia keuangan dan manajemen organisasi BCA sejak tahun 1984 mengajak peserta untuk mengenal lebih dalam tentang organisasi ADPI, organisasi dana pensiun pada umumnya, Dapen BCA, serta strategi merdeka finansial bagi mahasiswa. Selama sesi ini, Prof. Apriani Dorkas juga tampak antusias menyimak dan menjembatani jalannya diskusi serta tanya jawab.

2. SAVING, SPENDING, & INVESTING

Bapak Budi Sutrisno menegaskan bahwa dalam hidup, kita tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan keinginan (*want*), melainkan harus lebih cermat dalam menyusun skala prioritas kebutuhan (*need*).

Beliau menekankan pentingnya program *Saving, Reserve, Investment* (SRI) agar masa depan lebih tertata menuju kemerdekaan finansial. Program ini juga menjadi jawaban atas berbagai

masalah umum yang kerap dihadapi oleh individu dewasa, seperti:

- Sumber pendapatan (*sources of income*).
- Alokasi pengeluaran (*allocation of expenses*).
- Pendidikan anak setelah berkeluarga (*education of children*).
- Masalah utang piutang (*debt*).
- Investasi yang diperlukan atau dilakukan.
- Perlindungan risiko dan asuransi (*protection of risk and insurance*) yang sering kali terlupakan.

Berdasarkan pengalamannya yang kaya di dunia keuangan, Bapak Budi memberikan formula alokasi penghasilan yang ideal sebagai berikut:

- **Saving (Tabungan):** Minimal 10%.
- **Proteksi/Asuransi:** 10%.
- **Reserve (Cadangan):** 10%.
- **Gaya Hidup/Sosialisasi:** Maksimal 10%.
- **Investasi:** 10%.
- **Spending (Kebutuhan Pokok/Need):** Maksimal 50%.

Menurut Prof. Apriani (yang akrab disapa Prof. Ani), formula ini lazim dikenal sebagai strategi *saving, spending, and investing* secara cerdas (*smart*).

“Pak Budi telah menjelaskan dengan gamblang bahwa dalam kehidupan, kita perlu menerapkan strategi *save and invest* terlebih dahulu, baru kemudian *spend* (menabung dan investasi baru belanja). Secara praktik, kita harus cermat mengatur belanja untuk jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang,” imbuh Prof. Ani saat memoderatori acara.

Selanjutnya, Bapak Budi memaparkan strategi investasi dengan adagium PAS: *Prudent* (kehati-hatian), *Agile* (fleksibilitas dan adaptasi cepat), dan *Secure* (jaminan aman). Beliau juga mengelaborasi POJK No. 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, serta konsep dana pensiun yang menyelaraskan antara dana dengan investasi (*liability driven; maturity vs duration*).

3. TANTANGAN EDUKASI & KOMPETENSI (EDUKOM) KE DEPAN

Sebagai *observer*, penulis melihat bahwa acara ini berlangsung sukses dan tepat sasaran dalam memberikan edukasi, sosialisasi, serta literasi keuangan kepada masyarakat. Ke depannya, setidaknya ada tiga tantangan utama yang dapat disimpulkan:

Umpan Balik Positif Peserta: Mayoritas peserta memberikan respons positif dan menilai acara ini sangat relevan dalam menghubungkan dunia sekolah dengan dunia kerja. Acara ini berhasil membuka wawasan mengenai organisasi dana pensiun serta menggugah kesadaran pentingnya menabung (*saving*) dan berinvestasi (*investing*) dengan tetap bijak berbelanja. Beberapa peserta bahkan memberikan apresiasi personal bahwa narasumber sangat ramah, keren, dan inspiratif.

Tindak Lanjut Pasca-acara: Perlu dikembangkan kerja sama yang lebih erat antara DPP ADPI dan UKSW di berbagai bidang, seperti riset, pemagangan, pendidikan, pelatihan, hingga pengabdian masyarakat. Langkah ini akan memperkuat hubungan institusional sekaligus menciptakan keselarasan (*link and match*) antara dunia pendidikan dan industri dana pensiun.

Peningkatan Variasi Program: Program ini perlu diperluas dengan melibatkan organisasi mahasiswa secara aktif agar DPP ADPI dapat masuk ke dalam dinamika kampus. Diskusi teknis mengenai strategi kemerdekaan finansial pasca-kelulusan perlu diinisiasi lebih awal agar topik keuangan semakin populer di kalangan mahasiswa. Selain itu, program ini juga bisa dikembangkan ke tingkat sekolah menengah melalui gerakan *ADPI Goes to School*.

Semua tantangan ini tentu membutuhkan diskusi lebih lanjut demi pengembangan program yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Bravo ADPI! Terima kasih kepada Bapak Budi, Prof. Ani, dan seluruh partisipan atas suksesnya acara ini. □





Oleh: **Budi Sutrisno**
Direktur Utama Dana Pensiun BCA

“STANDARDISASI KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN/ SKKNI MRDP”

PEMBUKAAN

Dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global, diperlukan standar kompetensi SDM sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi untuk mendukung pengakuan kompetensi kerja sesuai struktur jabatan di sektor jasa keuangan. Selain itu pada saat ini masih belum adanya Sertifikasi Manajemen Risiko Dana Pensiun yang berbasis kompetensi seperti yang diatur dalam peraturan OJK yang terbaru. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK Institute memfasilitasi kegiatan yang di inisiasi oleh Direktur OJK Institute, Ni Nyoman Puspani, dengan urutan kegiatan RKKNI Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP) sebagai tertera dalam bagan.

Dalam Konvensi Nasional RKKNI Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP) yang dihadiri oleh sekitar 100 Dana Pensiun (Dapen), serta melibatkan peserta dari Tim Perumus, Tim Verifikasi, dan pihak OJK Institute, telah dilakukan pembahasan secara komprehensif terhadap rancangan

URUTAN KEGIATAN RKKNI MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN (MRDP)

- 1 10 Februari 2026**
Kick Off Meeting yang dihadiri: ADPI, ADPLK, Akademisi, dan membentuk Tim Perumus dan Tim Verifikasi untuk membuat RKKNI Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP)
- 2 25 Februari 2026**
Focus Group Discussion (FGD) - I
- 3 11 Maret 2026**
Focus Group Discussion (FGD) - II
- 4 02 April 2026**
Pembahasan draft dan verifikasi yang dihadiri oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
- 5 30 April 2026**
Konvensi Nasional RKKNI Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP) yang dihadiri oleh Kepala OJK Institute, Kristiani Puji Rahayu



Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan standar kompetensi yang disusun selaras dengan kebutuhan industri dana pensiun dan sektor jasa keuangan secara umum.

Melalui proses diskusi, evaluasi, serta penyempurnaan yang konstruktif, forum konvensi nasional tersebut akhirnya mencapai persetujuan atas draft SKKNI Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP) yang telah diringkas sebagaimana tercantum di bawah ini.

STANDARDISASI KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN:

Membedah Cetak Biru KKKNI Jenjang 4 Hingga Jenjang 7 Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner

1. Pendahuluan

Industri dana pensiun mengemban amanah krusial dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan hari tua masyarakat Indonesia. Mengingat sifat dana yang



dikelola berorientasi jangka panjang, pengelolaan risiko menjadi pilar penentu yang tidak boleh diabaikan. Kedinamisan pasar keuangan serta kompleksitas instrumen investasi modern menuntut para pelaku industri untuk tidak hanya sekadar memahami risiko secara intuitif, melainkan mengelolanya secara terstruktur, terukur, dan akuntabel.

Sebagai respons strategis terhadap tantangan tersebut, otoritas menetapkan regulasi formal berupa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Manajemen Risiko Dana Pensiun. Kebijakan yang disahkan di Jakarta oleh Ketua Dewan Komisiner Friderica Widyasari Dewi ini merumuskan standar kompetensi nasional yang terbagi ke dalam empat tingkatan krusial: **Jenjang 4, Jenjang 5, Jenjang 6, dan Jenjang 7.**

Standardisasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan cetak biru (*blueprint*) komprehensif untuk mentransformasi kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor dana pensiun. Artikel ini akan mengupas tuntas detail setiap jenjang kualifikasi, struktur pengemasan unit kompetensi, hingga internalisasi sikap kerja yang diwajibkan oleh regulasi terbaru ini.

2. Landasan Filosofis & Sikap Kerja (Societal & Professional Ethics)

Sebelum masuk ke dalam ranah teknis kompetensi, dokumen KKNI ini menegaskan bahwa seorang praktisi manajemen risiko wajib memiliki integritas berlapis. Kompetensi teknis tanpa dilandasi moralitas yang kuat justru dapat membahayakan keamanan

dana kelolaan nasabah. Oleh karena itu, regulasi ini membagi sikap kerja menjadi dua kategori utama yang berlaku sama di seluruh jenjang:

A. Sikap Kerja Umum

Setiap personil di bidang manajemen risiko dana pensiun dituntut untuk memiliki landasan kebangsaan dan moralitas universal yang kokoh, meliputi:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan setiap tugas yang dibebankan.
3. Berperan aktif sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
4. Mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat serta lingkungannya.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, serta menghormati pendapat atau temuan orisinal dari orang lain.
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas di atas kepentingan pribadi atau golongan.

B. Sikap Kerja Khusus Industri Dana Pensiun

Pada sisi profesionalisme sektoral, terdapat matriks nilai perilaku yang disesuaikan dengan tanggung jawab fungsional masing-masing tingkatan:

3. Analisis Mendalam Tiap Jenjang Kualifikasi KKKNI

3.1. JENJANG 4: Fondasi Operasional Pengelolaan Risiko
Kemungkinan Jabatan: Staf Fungsi Investasi/Staf Manajemen Risiko.

A. Deskripsi & Karakteristik Kerja

Jenjang 4 diposisikan sebagai garda terdepan pelaksanaan teknis harian. Personil pada level ini wajib menguasai pengetahuan



MATRIKS NILAI PERILAKU YANG DISESUAIKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB FUNGSIONAL MASING-MASING TINGKATAN

NILAI INTI SIKAP KHUSUS	JENJANG 4 [STAF]	JENJANG 5 [MANAJER]	JENJANG 6 [KOMITE/DEWAS]	JENJANG 7 [DIREKSI]
Prudence [Kehati-hatian]	Teliti dalam mengelola risiko seluruh aktivitas.	Prudent dalam investasi dan pengelolaan risiko.	Prudent dalam mengelola risiko melekat.	Prudent dalam mengelola risiko seluruh aktivitas.
Akuntabilitas	Akuntabel dalam melakukan pengukuran risiko.	Akuntabel mengiden-tifikasi risiko investasi & operasional.	Akuntabel mengidentifikasi risiko investasi & operasional.	Akuntabel mengidentifikasi potensi risiko operasional.
Independensi & Objektivitas	Menjunjung tinggi independensi dan bersikap objektif.	Independen dan objektif menilai kondisi aktual.	Independen dalam pengawasan; objektif beri rekomendasi.	Independen dalam memantau risiko; objektif beri analisis.
Tanggung Jawab Kerja	Bertanggung jawab atas akurasi data & respons risiko.	Bertanggung jawab atas kualitas data dan cegah kerugian.	Memberikan arahan strategis sesuai visi misi organisasi.	Mengambil keputusan strategis dalam manajemen risiko.
Komunikasi & Kepatuhan	Komunikatif serta disiplin pada regulasi & prosedur.	Transparan dalam menyampaikan informasi ke eksternal/ internal.	Transparan kepada stakeholders; taat prosedur.	Transparan menyampaikan strategi; patuh regulasi.

beberapa prinsip dasar serta metode yang sesuai untuk melaksanakan serangkaian kegiatan manajemen risiko secara spesifik. Mereka bertugas mengidentifikasi potensi risiko melalui kajian karakteristik melekat (*inherent risk*), mengukur dan menilai tingkat risiko, serta merespons risiko demi memitigasi risiko residual (*residual risk*). Secara manajerial, mereka bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri, harus mampu menyelaraskan permasalahan faktual di lapangan, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, serta dapat diberi tanggung jawab terbatas atas mutu hasil kerja orang lain.

B. Struktur Aturan Pengemasan Unit Kompetensi

Pada Jenjang 4, kandidat diwajibkan menyelesaikan total 3 (**tiga**) **unit kompetensi**, yang terbagi menjadi 1 unit kompetensi inti dan memilih 2 dari 3 unit kompetensi pilihan yang tersedia. Menariknya, seluruh unit ini **tidak memiliki persyaratan kompetensi prasyarat** (*no prerequisites*).

- **Kompetensi Inti:**
1. **K.65DPN00.012.1** - Mengidentifikasi Potensi Risiko.
- **Kompetensi Pilihan:**
1. **K.65DPN00.013.1** - Mengukur Risiko.
2. **K.65DPN00.014.1** - Merespons Risiko.
3. **K.65DPN00.016.1** - Mengelola Penerapan Tata Kelola. *(tidak dipilih)

3.2. JENJANG 5: Jembatan Taktis dan Penyelarasan Prosedural
Kemungkinan Jabatan: Manajer sampai dengan Pejabat Dua Tingkat di Bawah Direksi yang membidangi Fungsi Investasi/Manajemen Risiko.

A. Deskripsi & Karakteristik Kerja
Berada pada level taktis, Jenjang 5 menuntut penguasaan konsep teoritis yang lebih luas guna mengelola kegiatan manajemen risiko dalam lingkup makro menggunakan berbagai metode. Selain melakukan siklus identifikasi dan pengukuran risiko dasar, pemangku jabatan di level ini memikul tanggung jawab krusial untuk **mengelola**

TABEL KOMPARASI KOMPREHENSIF PENEMPATAN UNIT KOMPETENSI UNTUK MELIHAT PETA JALANNYA SECARA UTUH:

KODE UNIT	NAMA UNIT KOMPETENSI	JENJANG 4	JENJANG 5	JENJANG 6	JENJANG 7
K.65DPN00.009.1	Merancang Strategi Investasi	-	-	-	INTI
K.65DPN00.010.1	Mengelola Pelaksanaan Investasi	-	INTI	-	Pilihan
K.65DPN00.011.1	Mengevaluasi Kinerja Investasi	-	-	INTI	Pilihan
K.65DPN00.012.1	Mengidentifikasi Potensi Risiko	INTI	Pilihan	Pilihan	INTI
K.65DPN00.013.1	Mengukur Risiko	Pilihan	INTI	Pilihan	INTI
K.65DPN00.014.1	Merespons Risiko	Pilihan	Pilihan	INTI	INTI
K.65DPN00.015.1	Merumuskan Kebijakan Tata Kelola	-	Pilihan	Pilihan	-
K.65DPN00.016.1	Mengelola Penerapan Tata Kelola	Pilihan	-	-	Pilihan

ANALISIS STRATEGIS TERHADAP POLA KOMPETENSI:

- **Fleksibilitas Tanpa Prasyarat:** Fakta bahwa seluruh unit kompetensi dalam tabel di atas memiliki status persyaratan kompetensi **“Tidak ada”** menunjukkan niat regulator untuk membuka akses seluas-luasnya bagi akselerasi sertifikasi profesi. Seseorang yang memiliki kapabilitas dan rekam jejak manajerial dapat langsung mengambil sertifikasi Jenjang 7 tanpa harus lulus ujian sertifikasi Jenjang 4 secara sekuensial.
- **Polarisasi Identifikasi vs Strategi:** Unit Mengidentifikasi Potensi Risiko [K.65DPN00.012.1] diposisikan sebagai Kompetensi Inti pada level dasar [Jenjang 4] karena merupakan keterampilan teknis dasar, namun kembali naik menjadi Kompetensi Inti di level tertinggi [Jenjang 7] karena Direksi memegang kendali akhir atas pemetaan *risk register* makro organisasi.

pelaksanaan investasi dana pensiun agar selaras dengan batasan toleransi risiko (*risk appetite*) yang telah disepakati. Kemampuan manajerialnya mencakup penyelesaian masalah prosedural, memimpin dan mengelola kelompok kerja (*teamwork*), menyusun laporan tertulis yang komprehensif, serta bertanggung jawab penuh atas pencapaian hasil kerja kelompok.

B. Struktur Aturan Pengemasan Unit Kompetensi

Total kompetensi yang harus dipenuhi naik menjadi 4 (**empat**) **unit kompetensi** (2 unit kompetensi inti dan 2 unit pilihan dari 3 opsi).

- **Kompetensi Inti:**
1. **K.65DPN00.010.1** - Mengelola Pelaksanaan Investasi.
- 2. **K.65DPN00.013.1** - Mengukur Risiko.
- **Kompetensi Pilihan:**
1. **K.65DPN00.012.1** - Mengidentifikasi Potensi Risiko.
2. **K.65DPN00.014.1** - Merespons Risiko.

3. **K.65DPN00.015.1** - Merumuskan Kebijakan Tata Kelola. *(tidak dipilih)

3.3. JENJANG 6: Evaluasi Independen dan Fungsi Pengawasan
Kemungkinan Jabatan: Komite Pemantau Risiko, Dewan Pengawas.

A. Deskripsi & Karakteristik Kerja
Jenjang 6 adalah wilayah bagi organ pengawasan makro institusi. Kualifikasi ini didukung oleh pengetahuan mendalam untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko serta kinerja portofolio investasi dana pensiun secara menyeluruh. Peran utamanya bergeser dari pelaksana taktis menjadi pemberi arahan strategis dan *evaluator* independen. Secara keterampilan, mereka dituntut adaptif dalam memecahkan kebuntuan prosedural, mampu mengambil keputusan krusial berbasis analisis komparatif atas data dan informasi, serta bertanggung jawab penuh atas

pencapaian hasil kerja organisasi.

B. Struktur Aturan Pengemasan Unit Kompetensi

Sama seperti level manajer, jenjang ini mewajibkan pemenuhan 4 (**empat**) **unit kompetensi** (2 inti dan 2 pilihan dari 3 opsi). Fokus intinya bergeser pada aspek evaluatif.

- **Kompetensi Inti:**
1. **K.65DPN00.011.1** - Mengevaluasi Kinerja Investasi.
2. **K.65DPN00.014.1** - Merespons Risiko.
- **Kompetensi Pilihan:**
1. **K.65DPN00.012.1** - Mengidentifikasi Potensi Risiko.
2. **K.65DPN00.013.1** - Mengukur Risiko.
3. **K.65DPN00.015.1** - Merumuskan Kebijakan Tata Kelola. *(tidak dipilih)

3.4. JENJANG 7: Arsitek Strategis dan Pengambil Keputusan Tertinggi
Kemungkinan Jabatan: Direksi, Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi yang membidangi Fungsi Investasi/Manajemen Risiko.

A. Deskripsi & Karakteristik Kerja

Sebagai puncak dalam struktur kualifikasi profesi, Jenjang 7 menuntut penguasaan pengetahuan secara komprehensif, multi-aspek, dan holistik. Pemegang kualifikasi ini memikul tanggung jawab tertinggi dalam **merancang strategi investasi awal** serta memitigasi seluruh spektrum risiko secara menyeluruh.

Mereka wajib memiliki ketajaman analisis untuk mengurai masalah kompleks melalui pendekatan lintas sektoral, mengambil keputusan strategis di bawah ketidakpastian pasar, serta memikul akuntabilitas hukum dan moral mutlak atas eksistensi seluruh organisasi.

B. Struktur Aturan Pengemasan Unit Kompetensi

Karena bobot tanggung jawabnya yang masif, aturan pengemasan unit kompetensi pada jenjang ini melonjak drastis, mewajibkan penguasaan **6 (enam) unit kompetensi** (4 unit kompetensi inti ditambah 2 pilihan dari 3 opsi).

- **Kompetensi Inti:**
 1. **K.65DPN00.009.1** - Merancang Strategi Investasi.
 2. **K.65DPN00.012.1** - Mengidentifikasi Potensi Risiko.
 3. **K.65DPN00.013.1** - Mengukur Risiko.
 4. **K.65DPN00.014.1** - Merespons Risiko.
- **Kompetensi Pilihan:**
 1. **K.65DPN00.010.1** - Mengelola Pelaksanaan Investasi.
 2. **K.65DPN00.011.1** - Mengevaluasi Kinerja Investasi.
 3. **K.65DPN00.016.1** - Mengelola Penerapan Tata Kelola. *(tidak dipilih)

4. Pemetaan Hubungan Unit Kompetensi Antar Jenjang

Jika diteliti secara mendalam, terdapat pola menarik dalam penyusunan unit kompetensi ini. Beberapa kode unit kompetensi muncul berulang di lintas jenjang, namun bergeser statusnya dari



PROGRAM PELATIHAN DAN UJI KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN (MRDP) DIRENCANAKAN AKAN MULAI DILAKSANAKAN PADA KUARTAL IV TAHUN 2026.”

kompetensi pilihan menjadi kompetensi inti, atau sebaliknya. Hal ini mengindikasikan adanya kedalaman implementasi (*depth of execution*) yang berbeda berdasarkan peran kerja. Perhatikan tabel komparasi komprehensif penempatan unit kompetensi untuk melihat peta jalannya secara utuh.

5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI BAGI INDUSTRI

Penerbitan cetak biru KKNi Manajemen Risiko Dana Pensiun yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisiner ini membawa implikasi transformasional yang masif bagi lanskap industri keuangan non-bank di Indonesia. Kebijakan ini menegaskan bahwa era pengelolaan dana pensiun yang bersifat konvensional atau sekadar mengandalkan intuisi telah berakhir.

Implikasi Utama bagi Para Pemangku Kepentingan:

- **Bagi Pengurus & Direksi Dana Pensiun:** Standar ini memperjelas garis delegasi tugas dan mitigasi risiko. Direksi (Jenjang 7) memegang kendali atas desain strategi besar, Dewan Pengawas (Jenjang 6) mengawasi secara independen, Manajer (Jenjang 5) menyelaraskan kepatuhan investasi, dan Staf (Jenjang 4) mengamankan data dan respons harian.
- **Bagi Praktisi & SDM Keuangan:** Keberadaan KKNi ini memberikan peta jalan karier (*career path*) yang sangat transparan. Profesional di bidang dana pensiun kini dapat se-

cara objektif mengukur kesenjangan kompetensi (*competency gap*) yang mereka miliki dan mengambil pelatihan yang relevan demi kenaikan jenjang jabatan.

- **Bagi Perlindungan Nasabah:** Implementasi sertifikasi berbasis KKNi ini akan meningkatkan rasa percaya diri (*confidence level*) masyarakat terhadap industri dana pensiun. Risiko salah urus investasi akibat ketidakcakapan SDM dapat ditekan semaksimal mungkin melalui penegakan kompetensi yang rigid dan terstandarisasi.

PENUTUP

Dengan disusunnya standar kompetensi ini, diharapkan dapat menjadi pedoman sekaligus persyaratan bagi seluruh insan dana pensiun dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas kompetensi kerja di bidang Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP). Standar kompetensi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam proses sertifikasi kompetensi, yang mencakup tahapan pelatihan dan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui implementasi yang terstruktur, diharapkan tercipta sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan mampu memenuhi tuntutan industri jasa keuangan yang semakin dinamis.

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi ini akan melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta Lembaga Sertifikasi Dana Pensiun (LSDP) sebagai pihak yang berwenang dalam proses sertifikasi dan pengakuan kompetensi Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP). Adapun program pelatihan dan uji kompetensi Manajemen Risiko Dana Pensiun (MRDP) direncanakan akan mulai dilaksanakan pada Kuartal IV tahun 2026, sehingga seluruh peserta dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mendukung implementasi standar kompetensi tersebut secara optimal. □

Selamat Ulang Tahun

DANA PENSIUN YANG BERDIRI BULAN MEI & JUNI

NAMA DANA PENSIUN

TANGGAL PENDIRIAN DANA PENSIUN

MEI

1	DANA PENSIUN BANK CENTRAL ASIA	1 Mei 1993
2	DANA PENSIUN MANDOM INDONESIA	1 Mei 1996
3	DANA PENSIUN PEGAWAI UMM	3 Mei 2006
4	DANA PENSIUN HUTAMA KARYA	30 Mei 1988

JUNI

1	DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)	1 Juni 1965
2	DANA PENSIUN BASF INDONESIA	1 Juni 2000
3	DANA PENSIUN PT. BANK NTB	7 Juni 1988
4	DANA PENSIUN IURAN PASTI BOGASARI	9 Juni 1993
5	DANA PENSIUN MANFAAT PASTI BOGASARI	9 Juni 1993
6	DANA PENSIUN WIJAYA KARYA PPMP	9 Juni 1998
7	DANA PENSIUN PT. BPD SULAWESI TENGGARA	10 Juni 1995
8	DANA PENSIUN PPIP-PUSRI PALEMBANG	11 Juni 2008
9	DANA PENSIUN BAPTIS INDONESIA	12 Juni 1989
10	DANA PENSIUN BANK SULSELBAR	14 Juni 1996
11	DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA	18 Juni 1994
12	DANA PENSIUN BANK BJB	18 Juni 1994
13	DANA PENSIUN PUSRI	20 Juni 1974
14	DANA PENSIUN KALBE FARMA	20 Juni 1989
15	DANA PENSIUN PT. BANK NAGARI	23 Juni 1995
16	DANA PENSIUN KRAKATAU STEEL	24 Juni 1981
17	DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI	28 Juni 2021



ADPI

KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI TAHUN 2026

● SERTIFIKASI

No	Pelatihan	DURASI (HARI)	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
1	KKNI JENJANG 7 BIDANG DANA PENSIUN	2	20-21	10-11		21-22	19-20	23-24	21-22	18-19	15-16	20-21	17-18	15-16
2	KKNI JENJANG 6C BIDANG DANA PENSIUN SUB BIDANG PENGAWASAN DANA PENSIUN	2	22-23	12-13		23-24	21-22	25-26	23-24	20-21	17-18	22-23	19-20	17-18
3	KKNI JENJANG 6A BIDANG DANA PENSIUN SUB BIDANG PENGELOLAAN DANA PENSIUN	1	29					11				15		
4	KKNI JENJANG 5 BIDANG DANA PENSIUN	2				16-17			28-29				10-11	
5	KKNI JENJANG 4 BIDANG DANA PENSIUN	2	27-28				18-19			11-12				8-9
6	JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENGELOLAAN INVESTASI (WMI)	5	26-30			6-10			6-10				9-13	
7	JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENGELOLAAN INVESTASI (WMI) - SUDAH CFIA	3					5-7					27-29		

● NON-SERTIFIKASI

No	Pelatihan	DURASI (HARI)	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
1	MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN	3	6-8	3-5		7-9	5-7	2-4	7-9	4-6	1-3	6-8	3-5	1-3
2	MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN	2		9-10			12-13		14-15			13-14		
3	AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN	2	13-14			28-29		9-10				27-28		
4	MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN	2		4-5			11-12		15-16		22-23			
5	MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSIUN	2					25-26						24-25	
6	PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DANA PENSIUN	2							29-30		29-30			
7	INTERNAL AUDIT DANA PENSIUN	2				14-15					8-9			
8	PENYUSUNAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO	2						17-18					25-26	

Catatan:

- (1) Biaya pendaftaran pelatihan di atas, belum termasuk PPh 23 sebesar 2% yang menjadi kewajiban Pendaftar,
- (2) Semua pelatihan dalam kalender diklat dan workshop Perkumpulan ADPI akan mendapatkan Sertifikat Pengetahuan Berkelanjutan Bidang Dana Pensiun,
- (3) Penyelenggaraan In House Training / Private Class di luar jadwal kaldik Perkumpulan ADPI akan diatur secara tersendiri, silahkan menghubungi email diklat@adpi.or.id



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi

Contact Person: **Marissa/Nisa**: 021-2514761/62 • diklat@adpi.or.id